**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PERTUMBUHAN
UMKM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh:
Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PERTUMBUHAN
UMKM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PERTUMBUHAN
UMKM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Nur Ismi Romadhoni

NIM : 212105030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A

NIP. 199206062020122010

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PERTUMBUHAN
UMKM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP. 199403042019032019

Udik Mashudi, S.E., M.M.
NUP. 2005106

Anggota:

1. **Dr. Sofiah, M.E.**
2. **Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A.**

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr [59] : 7)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag,” accessed May 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berjasa dalam keberhasilan saya ini, yakni:

1. Ibu penulis Almh. Sri Yuliani, yang telah pergi meninggalkan penulis saat perjalanan ini baru dimulai. Ibu merupakan sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Meskipun ibu tidak dapat melihat pencapaian ini, setiap langkah yang penulis ambil dalam menuntut ilmu adalah wujud dari doa dan harapan ibu. Semoga semua yang ibu impikan dapat terwujud dalam setiap langkah yang penulis tempuh ke depan. *Love you mom, you're always the best for me.* Al-Fatihah.
2. Ayah penulis Imam Sanusi, yang telah menjadi sumber motivasi dalam setiap langkah perjalanan penulis. Nasihat dan bimbingan yang ayah berikan telah menjadi cahaya yang menerangi jalan penulis dalam menuntut ilmu. Terima kasih juga karena telah bekerja keras dalam segala hal terutama selama penulis menuntut ilmu untuk menempuh gelar sarjana ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah ayah curahkan.
3. Kedua kakak perempuan penulis tercinta, yaitu Reza Agustin Citra Dewi, dan Munawaroh Isninaeni Agustin, serta kedua kakak ipar saya yaitu Ahmad Fajar Ustadi, dan Ahmad Arifin. Terima kasih atas dukungan, doa, dan

motivasi yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap langkah ataupun keputusan yang penulis ambil. Kehadiran dan perhatian kalian telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Kedua sahabat kuliah penulis Nur Hidayanti, dan Riska Jannah Fauziah yang selalu siap membantu setiap penulis membutuhkan bantuan dan selalu menjadi tempat keluh kesah setiap penulis mengalami masa-masa sulit. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama perkuliahan sampai saat ini.
5. Ketiga sahabat penulis yaitu Anandien Putri Prameshwary, Bintang Permata, dan Winie Angelina Putri yang selalu menemani dan menjadi sumber kebahagiaan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita dan berbagi keceriaan di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini.
6. Seluruh teman-teman terdekat yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan di masa-masa akhir perkuliahan ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2 angkatan 2021. Terima kasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan, terima kasih juga untuk doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan skripsi ini dapat penulis peroleh dikarenakan terdapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ana Pratiwi, SE., Ak., M.S.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, hal ini sangat berarti dan sangat membantu penulis dalam mengatasi berbagai kendala yang sulit penulis hadapi.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik serta memberi ilmu kepada penulis.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi terkait.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Jember, 30 April 2025
Penulis

Nur Ismi Romadhoni
NIM. 212105030034

ABSTRAK

Nur Ismi Romadhoni, 2025: *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)*

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan UMKM

Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi lebih unggul dibandingkan daerah Tapal Kuda lainnya. Diharapkan pertumbuhan UMKM dapat berperan dan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan didukung pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat.

Rumusan masalah yang diteliti adalah: 1) Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM daerah? 2) Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM daerah? 3) Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? 4) Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? 5) Apakah pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? 6) Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? 7) Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan UMKM daerah. 2) Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan UMKM daerah. 3) Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 4) Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 5) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 6) Untuk mengetahui mediasi pertumbuhan UMKM antara pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 7) Untuk mengetahui mediasi pertumbuhan UMKM antara pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Populasi dan sampel menggunakan LRA, tingkat PDRB, dan jumlah UMKM periode 2017 – 2023. Analisis data dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Analisis Jalur (*Path Analysis*), dan Uji Sobel (*Sobel Test*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rasio Efektivitas PAD (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM (Z). 2) Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM (Z). 3) Rasio Efektivitas PAD (X_1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). 4) Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). 5) Pertumbuhan UMKM (Z) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). 6) Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). 7) Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
1. Variabel Penelitian	15
2. Indikator Penelitian	16
F. Definisi Operasional.....	17
G. Asumsi Penelitian.....	19
H. Hipotesis.....	23

I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kajian Teori.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	65
B. Populasi dan Sampel	65
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	66
D. Analisis Data	67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	76
A. Gambaran Obyek Penelitian	76
B. Penyajian Data	78
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	87
D. Pembahasan.....	109
BAB V PENUTUP.....	123
A. Simpulan	123
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lumajang dan Kab. Bondowoso Tahun 2017 – 2023 (%).....	4
1.2	Data Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2023	9
2.1	Penelitian Terdahulu.....	41
3.1	Kriteria Penilaian Efektivitas PAD	67
3.2	Kriteria Penilaian Efisiensi PAD.....	68
4.1	LRA Tahun Anggaran 2017.....	79
4.2	LRA Tahun Anggaran 2018.....	80
4.3	LRA Tahun Anggaran 2019.....	81
4.4	LRA Tahun Anggaran 2020.....	82
4.5	LRA Tahun Anggaran 2021.....	83
4.6	LRA Tahun Anggaran 2022.....	84
4.7	LRA Tahun Anggaran 2023.....	85
4.8	Penghitungan Rasio Efektivitas PAD.....	88
4.9	Penghitungan Rasio Efisiensi PAD	89
4.10	Hasil Uji Normalitas Model I.....	90
4.11	Hasil Uji Normalitas Model II	91
4.12	Hasil Uji Multikolinieritas Model I.....	92
4.13	Hasil Uji Multikolinieritas Model II	93
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I.....	94

4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II	95
4.16 Hasil Uji Autokorelasi Model I.....	96
4.17 Hasil Uji Autokorelasi Model II.....	97
4.18 Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model I	98
4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model I	100
4.20 Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model II.....	101
4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model II.....	103
4.22 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Periode 2017 – 2023	119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Jember Tahun 2017 – 2023 (%)	3
1.2	Kerangka Teori.....	22
1.3	Kerangka Konseptual.....	30
4.1	Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kab. Jember Tahun 2023.....	78
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2023.....	86
4.3	Pertumbuhan UMKM Tahun 2017 – 2023.....	87
4.4	Diagram Jalur Model I.....	104
4.5	Digram Jalur Model II.....	105
4.6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Periode 2017 – 2023.....	117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.² Dalam perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.³ Menurut Schumpeter dalam Rezki pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada suatu saat akan mengalami kemunduran.⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Menurut Jhingan, dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Faktor Ekonomi, menganggap bahwa laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Faktor ekonomi ini terdiri atas: a) Akumulasi Modal; b) Kemajuan Teknologi;

² Kurni Adi Suwandi, Afrizal Tahar, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerrintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)," *Jurnal InFestasi* 11, no. 2 (2015): 123.

³ Handhofi Tisna Wardhana, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011" (Skripsi, Universitas jember, 2013), 13.

⁴ Rezki Istigfharis, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangkaraya*, ed. Aas Masruroh, *Widina Bhakti Persada Bandung*, vol. 1 (Bandung, 2021), 9.

c) Pembagian Kerja dan Skala Produksi; d) Sumber Daya Alam; dan e) Organisasi. 2) Faktor Non-Ekonomi, pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, di luar analisa faktor ekonomi, membawa kita kepada pengkajian terhadap unsur-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosiologis. Faktor non-ekonomi ini terdiri atas: a) Faktor Sosial; b) Faktor Manusia; dan c) Faktor Politik dan Administratif.⁵

Selain itu, terdapat juga faktor lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi menurut Teori Keynes yaitu dengan bantuan belanja pemerintah yang akan memberikan kesempatan kerja penuh bagi masyarakat, dimana nantinya juga akan memberikan kesempatan untuk menumbuhkan perekonomian daerah.⁶ Hasil penelitian oleh Fajri dan Iriani mengungkapkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.⁷ Maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah diperlukan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu dapat mengurangi pengangguran.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang ikut serta dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, sehingga Kabupaten Jember diharapkan dapat menentukan penerimaan keuangan daerah maupun pengeluaran daerah untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Jember. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten

⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 67–76.

⁶ Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), 41.

⁷ Ahadi Akbar Fajri and Ririt Iriani, “Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021,” *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2022): 53–66, <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2555>.

Jember membuka peluang untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan persaingan yang positif antar daerah.⁸

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2023 disajikan pada gambar 1.1 dibawah:

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Jember Tahun 2017 – 2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan akhir Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menurun pada tahun 2017 – 2018 yang disebabkan oleh kategori pertumbuhan Industri Pengolahan.⁹ Ditahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan, yang didukung oleh kategori pertambangan dan penggalian.¹⁰ Pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan ekonomi namun cukup drastis, hal ini disebabkan turunnya produksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi hingga akhir tahun

⁸ Vina Risky Indahsari, “Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Dalam Sektor Pertanian” (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 3.

⁹ BPS, *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019*, ed. Endang Widyarti and Oanesa Timoralif Cahya (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2020), 91, <https://jemberkab.bps.go.id/id>.

¹⁰ BPS, 88.

2020.¹¹ Jika dilihat dari grafik di atas tahun 2021 – 2023 ekonomi mulai pulih, terdapat peningkatan ekonomi yang dimana peningkatan tersebut didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selama tahun 2017 – 2023 ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember di dominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; dan informasi dan komunikasi.¹²

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di daerah Tapal Kuda, misalnya Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso selama periode tahun 2017 – 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lumajang dan Kab. Bondowoso
Tahun 2017 -2023 (%)

Kab / Thn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lumajang	5,05	5,02	4,61	-2,79	3,14	4,43	5,00
Bondowoso	5,03	5,08	5,30	-1,36	3,49	3,51	4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 – 2023 di dominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan;

¹¹ BPS, “Berita Resmi Statistik,” *Bps.Go.Id* 19, no. 27 (2022): 2, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>.

¹² BPS, *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 73.

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian.¹³ Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 – 2023 di dominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan informasi dan komunikasi.¹⁴

Ketiga Kabupaten diatas sama-sama memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang di dominasi oleh industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran yang di mana sektor ini akan dapat berkontribusi pada pertumbuhan UMKM. Namun jika dibandingkan ketiganya, Kabupaten Jember lebih unggul untuk laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2017 – 2023.

Penelitian Wardhana menyebutkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Jember berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kapasitas fiskal yang baik. Kapasitas fiskal daerah adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Kapasitas fiskal daerah dapat dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu.¹⁶ Penelitian oleh Tiara menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi

¹³ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha*, ed. BPS Kab. Lumajang, vol. 9 (Lumajang: BPS Kab. Lumajang, 2024), 110.

¹⁴ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha*, ed. BPS Kab. Bondowoso, Volume 17 (Bondowoso: BPS Kab. Bondowoso, 2024), 90.

¹⁵ Wardhana, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011,” 98.

¹⁶ Kemenkeu Learning Center, A Ali Mashduqi, *Mengenal Kapasitas Fiskal Daerah*, 2023, Diakses pada 9 September 2024, Pukul 18.05, Pada link <https://klc2.kemenkeu.go.id>

fiskal secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.¹⁷ Kinerja keuangan sendiri merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.¹⁸ Kinerja keuangan merujuk pada hasil dan prestasi finansial suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Kinerja keuangan menjadi penting karena memberikan gambaran tentang keberlanjutan dan kesehatan finansial entitas, serta kemampuannya untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Menganalisis kinerja keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi tren, kelemahan, dan peluang yang perlu ditindaklanjuti.¹⁹

Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Upaya pemerintah Daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip

¹⁷ ferani inggrid Tiara, "Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur," *Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya*, 2016, 9.

¹⁸ Ana Pratiwi and Fitriatul Muqmiroh, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022): 117, <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.

¹⁹ Alif Al Ghifari Pulungan, Inggrit Syahla Octalin, and Ratih Kusumastuti, "Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Pada Kinerja Keuangan PT.Telkon Indonesia Tbk (Periode 2020-2022)," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 248, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.984>.

value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.²⁰

Seperti yang dikatakan oleh Tambunan dalam Harianto, dkk bahwa dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut akan lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²¹ Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.²²

Menurut Halim, salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang tertuang dalam APBD.²³ Hasil penelitian oleh Rachman menyatakan bahwa bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut

²⁰ Havid Sularso and Yanuar E. Restianto, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah," *Media Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 110.

²¹ Priyo Hari Adi David Harianto, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum , Belanja Modal , Aspp-15," *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, no. August (2007): 8.

²² Lutfiyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* vol 4, no. no 2 (2016): 205.

²³ Muhammad Syam Halim, Abdul; Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba 4, 2014), 231.

terlihat dari nilai determinasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 84,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.²⁴ Hal tersebut juga sependapat dengan penelitian Wardhana, bahwa kapasitas fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kapasitas fiskal yang baik.²⁵

Selain kapasitas fiskal, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. UMKM terbukti mampu bertahan melewati krisis pada masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, UMKM juga perlu untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Kabupaten Jember dengan menciptakan lapangan kerja. Berikut data UMKM Kabupaten Jember tahun 2017 – 2023:

²⁴ Ridho Rachman, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 80.

²⁵ Wardhana, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011,” 98.

²⁶ Sulastri, “Peran Penting UMKM Dalam Ancaman Isu Resesi,” Kementerian Keuangan, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>.

Tabel 1.2
Data Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan UMKM (per unit usaha)	868	778	219	6.416	365	872	391

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2025

UMKM sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat yang mayoritas masyarakatnya berada di lingkup pekerja dengan tingkat pendidikan rendah serta menjadi ladang sumber lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif.²⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr [59] : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59] : 7.²⁸

Dari penjelasan ayat diatas menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dalam hal ini UMKM bisa

²⁷ Anindita Trinura Novitasari, “Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah,” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9, no. 2 (2022): 185, <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>.

²⁸ “Qur’an Kemenag,” accessed March 21, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

menjadi salah satu instrumen distribusi pendapatan, yang memungkinkan distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata. Mengembangkan UMKM berarti mendorong akses ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

UMKM dalam perekonomian menunjukkan ada capaian kontribusi yang cukup bisa diperhitungkan untuk membawa pada perekonomian lebih baik yaitu melalui penyerapan tenaga kerja.²⁹ Kegiatan UMKM merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku UMKM dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga UMKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi didaerahnya.³⁰

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan UMKM juga menjadi faktor yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Supriatna, dkk yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM dapat menjadi kunci utama dalam mendorong

²⁹ Novitasari, "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah," 186.

³⁰ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 158, <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi.³¹ Menurut data website BPS Kabupaten Jember, salah satu peranan terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2023 di Kabupaten Jember dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,89 persen pada tahun 2023 (meningkat dari 14,77 persen di tahun 2022).³² Sektor perdagangan dalam hal ini UMKM juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Berbeda penelitian oleh Halim, yang menyatakan hasil bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.³³ Namun hal tersebut ditepis oleh penelitian Lamazi yang menunjukkan bahwa UMKM berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁴ Penelitian oleh Puspitaningrum menyatakan Pendapatan Sektor Pariwisata berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, tetapi Pertumbuhan UKM tidak meng-intervening hubungan pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah.³⁵

Beberapa penelitian diatas menunjukkan hubungan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak dengan UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh kinerja

³¹ Dasep Supriatna et al., “Pengaruh Kinerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi,” *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 1, no. 02 (2023): 43–53, <https://doi.org/10.58812/sek.v1i02.88>.

³² BPS, *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023*, 74.

³³ Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju,” 169.

³⁴ Lamazi, “Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (2020): 103–8, <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491>.

³⁵ Merynda Puspitaningrum, “Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Diy Dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Variabel Intervening,” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2016): 45–56, <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7999>.

keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan UMKM, dan pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji pengaruh mediasi pertumbuhan UMKM antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?
5. Apakah pertumbuhan UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?
6. Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?
7. Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi pertumbuhan UMKM antara pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi pertumbuhan UMKM antara pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember) ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan mengenai Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan beberapa rasio terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan UMKM yang saat ini sedang meningkat di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ini bisa secara langsung didapat oleh pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu peneliti, Masyarakat Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, dan bagi peneliti selanjutnya.

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam mengambil sebuah keputusan, dan kebijakan untuk memperbaiki dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Diharapkan juga agar UMKM di Kabupaten Jember untuk selalu dikembangkan dan ditingkatkan kembali.
- b. Bagi Masyarakat, untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan UMKM yang saat ini sedang meningkat di Kabupaten Jember.
- c. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai penilaian Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio efektivitas PAD

dan rasio efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan UMKM.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian.³⁶ Variabel dalam penelitian kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas merupakan penyebab perubahan variabel lain.³⁷ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas.³⁸ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 16.

³⁷ Sahir, 16–17.

³⁸ Sahir, 17.

c. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.³⁹ Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan UMKM Daerah.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel adalah rujukan empiris dari variabel yang diteliti. Indikator empiris ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat butir-butir atau item pertanyaan dalam angket, kuesioner, dan observasi.⁴⁰

a. Indikator dari variabel X

- 1) Rasio Efektivitas PAD
- 2) Rasio Efisiensi PAD

b. Indikator dari Variabel Y

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

c. Indikator dari Variabel Z

Jumlah Pertumbuhan UMKM Daerah per Tahunnya

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2013), 39.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 39–40.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.⁴¹

1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.⁴² Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yang bersumber dari APBD dapat dilakukan dengan lima indikator pengukuran yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio belanja rutin APBD, dan rasio belanja pembangunan APBD. Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah dikukur menggunakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD. Menurut Mahmudi, berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD dan Rasio efisiensi PAD:⁴³

Rumus Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

⁴¹ Penyusun, 40.

⁴² Suwandi, Tahar, and Yogyakarta, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)," 121.

⁴³ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keem (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 141.

Rumus Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dapat dikatakan efektif apabila, semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target penerimaan PAD.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas PAD perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi PAD yang dicapai pemerintah. Kinerja keuangan daerah dapat dikategorikan efisien apabila, semakin kecil rasio efisiensi maka menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara efisien dalam pemerolehan PAD.⁴⁴

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak.⁴⁵ Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun atau PDRB per tahun menurut harga konstan, yang dinyatakan dalam satuan persen. Dalam penelitian ini,

⁴⁴ Halim, Abdul; Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, L-6-L-7.

⁴⁵ Tiara, "Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur."

pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB per tahun. Berikut rumus untuk menghitung PDRB:⁴⁶

$$G_t = \frac{Yr_t - Yr_{t-1}}{Yr_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t : pertumbuhan ekonomi tahun t

Yr_t : pendapatan nasional tahun t

Yr_{t-1} : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

3. Pertumbuhan UMKM Daerah

Pertumbuhan UMKM merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perubahan jumlah unit UMKM yang meningkat dari waktu ke waktu. UMKM sebagai bagian dari sektor ekonomi yang telah terbukti mampu menopang perekonomian bangsa, bahkan saat bangsa berada di masa keterpurukan sekalipun sektor UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan dibandingkan usaha besar.⁴⁷ Dalam penelitian ini, pertumbuhan UMKM diukur menggunakan jumlah pertumbuhan UMKM per tahunnya.⁴⁸

G. Asumsi Penelitian

Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio

⁴⁶ Suparmono, "Pengantar Ekonomi Makro," 2018, 35.

⁴⁷ Novitasari, "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah," 188.

⁴⁸ Agung Parmono and Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol 6, no. 2 (2021): 236.

efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD yang menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas PAD yang baik akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan apakah sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk efisiensi PAD yang baik akan menunjukkan seberapa hemat pemerintah daerah dalam mengelola biaya yang digunakan untuk mencapai target pendapatan tersebut.⁴⁹

Pengeluaran Pemerintah dalam sudut pandang efisiensi PAD mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah yang menandakan bahwa efektivitas PAD juga semakin baik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan

⁴⁹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 89 & 141.

daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁰ Hasil penelitian Wardhana mengemukakan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵¹

Salah satu contoh pembangunan sarana dan prasarana yang dapat ditujukan adalah untuk pertumbuhan UMKM yang lebih baik. Penyediaan bantuan bagi UMKM yang akan berdampak untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan, seperti salah satunya adalah kegiatan bantuan bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). Bantuan bagi WMP dan SKP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 51, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Dengan program ini diharapkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul, dan berdaya saing bisa lebih cepat guna memperkuat perekonomian bangsa.⁵²

⁵⁰ Ambya, *Ekonomi Keuangan Daerah* (Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2023), 85–86.

⁵¹ Novitasari, “Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah.”

⁵² Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *International Journal of Technology*, Edisi Pert (Jakarta: Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan, 2021), 268–69,

<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950>
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816>
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>

Efektivitas PAD dan efisiensi PAD yang baik akan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan UMKM, yang nantinya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hasil penelitian Rachman mengemukakan bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efektivitas dan efisiensi PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵³ Begitu juga hasil penelitian oleh Rochdianingrum yang menyatakan bahwa banyaknya UMKM memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁴ Maka peneliti berasumsi bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dimediasi oleh pertumbuhan UMKM. Berikut kerangka teori dalam penelitian ini.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Gambar 1.2
Kerangka Teori

⁵³ Rachman, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018," 79.

⁵⁴ Widhi Ariestianti Rochdianingrum and Teguh Gunawan Setyabudi, "Keterkaitan Antara Jumlah Umkm Dan Tingkat Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* vol 3, no. 4 (2020): 543–62, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4136>.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diajukan dalam bentuk pernyataan sementara terhadap hasil penelitian.⁵⁵ Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hubungan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan UMKM daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah menggali kemampuan anggaran daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.⁵⁶

Rasio keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk UMKM. Meningkatnya PAD juga membuat sektor-sektor UMKM yang ada di daerah menjadi tumbuh, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.⁵⁷

Dalam pemetaan program pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa bantuan bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) yang

⁵⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 41.

⁵⁶ Salsabila Septiani Putri and Sungkono, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Economina* Vol 2, no. 7 (2023): 1558–59, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.627>.

⁵⁷ Muhammad Azhari, Andria Zulfa, and Murtala, "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Eonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh" Vol 5, no. 1 (2020): 89.

merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 51, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Dengan program ini diharapkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul, dan berdaya saing bisa lebih cepat.⁵⁸ Hal ini membuat penulis mengajukan hipotesis:

H₁ : Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM daerah

H₂ : Efisiensi PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM daerah

2. Hubungan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hubungan antara kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang penting dalam memahami lingkup ekonomi suatu daerah. Kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Rachman, bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.⁵⁹

⁵⁸ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 268.

⁵⁹ Rachman, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018," 81–82.

Menurut Myrdal, upaya untuk memberantas kemiskinan di negara-negara berkembang harus dilakukan melalui campur tangan pemerintah, terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas.⁶⁰ Kinerja keuangan daerah dapat menjadi salah satu kriteria untuk mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat. Kapasitas fiskal memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian di Kabupaten Jember oleh Wardhana, ditemukan bahwa peningkatan kapasitas fiskal berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dimana, semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki, semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.⁶¹

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.⁶² Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rachman yang mengemukakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁶³ Penelitian oleh Wardhana juga mengungkapkan bahwa

⁶⁰ Pheni Chalid, "Teori Pertumbuhan," in *Teori Dan Isu Pembangunan*, Edisi kedua (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 1.30.

⁶¹ Wardhana, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011," 98.

⁶² Samalua Wadma, "Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan," *Jurnal Warta*, 2016, 2.

⁶³ Rachman, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)," 58.

Kapasitas fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat penulis mengajukan hipotesis:

H₃ : Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H₄ : Efisiensi PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hubungan pertumbuhan UMKM daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian dengan mengelola sumber daya dan potensi, menjalin hubungan dengan penduduk setempat, dan membentuk lapangan kerja baru yang berdampak pada kemajuan kegiatan perekonomian lokal.⁶⁴

Kontribusi UMKM terhadap PDB adalah lebih besar dibandingkan dengan skala usaha besar, meskipun terkadang mengalami fluktuasi.⁶⁵ Seperti hasil penelitian oleh Firmansyah yang mengemukakan bahwa pertumbuhan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

⁶⁴ Erina Setiana Putri and Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 109, <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>.

⁶⁵ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 23.

Tulungagung Tahun 2013-2016.⁶⁶ UMKM mempunyai peran strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berkembangnya industri pangan oleh UMKM berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.⁶⁷

Salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan.⁶⁸ Tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, masih menjadi kendala yang membatasi kontribusi penuh mereka terhadap ekonomi lokal. Namun, penelitian oleh Rochdianingrum dan Setyabudi membuktikan bahwa besarnya tingkat teknologi yang digunakan dan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur.⁶⁹ Hal ini membuat penulis mengajukan hipotesis:

H₅ : Pertumbuhan UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

⁶⁶ Aditia Iqbal Firmansyah, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung," *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2023), 86, <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.604>.

⁶⁷ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 302.

⁶⁸ TNP2K, 268.

⁶⁹ Rochdianingrum and Setyabudi, "Keterkaitan Antara Jumlah Umkm Dan Tingkat Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur," 561.

4. Hubungan mediasi pertumbuhan UMKM antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dianalisis melalui peran mediasi oleh pertumbuhan UMKM. Berdasarkan Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kinerja keuangan daerah yang mencakup alokasi anggaran daerah untuk program-program pengembangan ekonomi lokal, berdampak langsung pada pertumbuhan UMKM, khususnya melalui program akses pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing usaha.⁷⁰

Pertumbuhan UMKM di sisi lain, berperan penting dalam meningkatkan kontribusi ekonomi lokal. UMKM yang berkembang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam laporan tersebut, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.⁷¹ Pertumbuhan ini tidak hanya berkontribusi pada kinerja ekonomi daerah tetapi juga secara keseluruhan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Dalam hal ini, pertumbuhan UMKM berfungsi sebagai jembatan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Ketika

⁷⁰ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 29.

⁷¹ TNP2K, 95.

pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung UMKM, dampaknya dirasakan langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, mediasi pertumbuhan UMKM dapat dilihat sebagai penghubung antara efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dimana, semakin besar dukungan daerah terhadap pengembangan UMKM, maka semakin signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang berpengaruh juga pada peningkatan pendapatan daerah, dan kemajuan UMKM itu sendiri. Hal ini membuat penulis mengajukan hipotesis:

H₆ : Pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh Efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H₇ : Pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh Efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Gambar 1.3
Kerangka Konseptual

Keterangan:

----- : Mediasi variabel Z antara variabel X_1 dengan variabel Y

----- : Mediasi variabel Z antara variabel X_2 dengan variabel Y

I. Sistematika Pembahasan

Berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,

definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesisi, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang serupa dan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM, dan variabel intervening.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai simpulan penelitian, dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.⁷²

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Agis Eles Sevigo, dan Nurul Lathifah, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022*, 2024, Journal of Trends Economics and Accounting Research, Surabaya.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan website resmi pemerintah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Produk Domestik Regional Bruto dan Realisasi Anggaran selama sepuluh tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efisiensi APBD

⁷² Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 40.

tidak terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara simultan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷³

2. Sulistyو Budi Utomo, Yenik Pujowati, dan Eva Yuniarti Utami, *Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis pada Komunitas UMKM di Jawa Timur*, 2024, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science, Surabaya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara. Sampel penelitian ini diambil dari komunitas UMKM di Jawa Timur dengan teknik pengambilan

sampel secara acak bertingkat, yang dianalisis menggunakan SEM-PLS.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Temuan-temuan menggarisbawahi dampak positif yang signifikan dari kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis di komunitas UMKM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan peraturan yang mendukung, akses ke sumber daya keuangan, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.⁷⁴

⁷³ Agis Eles Sevigo and Nurul Lathifah, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 3 (2024): 715–24, <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>.

⁷⁴ Sulistyو Budi Utomo, Yenik Pujowati, and Eva Yuniarti Utami, "Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, Dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis Pada

3. Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, dan Angga Permadi Karpriana, *Pengaruh Pedapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022*, 2024, Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, Pontianak.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik time series yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui website resminya. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal di Kota Pontianak dari Tahun 2013-2022. Teknik sampel yang digunakan adalah Teknik *full Sampling* atau sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan uji statistik SPSS 26. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kinerja keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Untuk membuktikan hal ini, dilakukan uji statistik pada uji t, di mana nilai hitung t adalah $-1,460 < 1,894$ tabel t, dengan tingkat signifikansi 0,1888 di atas 0,05. Hal ini bertentangan dengan H1, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Belanja Modal. Untuk membuktikan hal ini, uji statistik

Komunitas UMKM Di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 2, no. 02 (2024): 146–56, <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>.

pada uji t dilakukan. Nilai t hitung adalah $-1,328 < 1,894$ nilai t tabel, dengan tingkat signifikansi 0,266, yang di atas 0,05. Ini bertentangan dengan H2, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Belanja Modal.⁷⁵

4. Dedy Febry Rachman, dan Syaiful Amri, *Studi Literatur Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombok Timur Sebelum Covid 19*, 2023, JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan), Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif. Sampel penelitian terdiri dari data yang terkait dengan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur (dalam persentase), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persentase). Periode pengamatan mencakup tahun 2010 – 2019. Teknik analisis data melibatkan serangkaian pengujian, seperti uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan uji hipotesis. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H1: Kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh Rasio Kemandirian, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan dapat ditolak. H2: Kinerja keuangan daerah, khususnya Rasio Efektivitas, secara parsial tidak

⁷⁵ Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, and Angga Permadi Karpriana, "Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada," *JISAMAR: Ournal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 18, no. 04 (2024): 720–32, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>.

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. H3: Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. H4: Kinerja Keuangan Daerah, melibatkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Pertumbuhan Ekonomi, tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat Pengangguran dan dapat ditolak. H5: Kinerja Keuangan Daerah, khususnya Rasio Kemandirian, tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. H6: Kinerja Keuangan Daerah, terutama Rasio Efektivitas, berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat diterima. H7: Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak.⁷⁶

5. Filasti Rahma, Yunarsi, Wilda Fatmala, dan Dewi Yulianti, *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia*, 2022, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Sulawesi Tenggara.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Obyek utama dari penelitian ini adalah kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bombana. Data

⁷⁶ Dedy Febry Rachman and Syaiful Amri, "Studi Literatur Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Pelaku Wirausaha Di Kabupaten Lombok Timur Sebelum Covid 19.," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 2 (2023): 709–20, <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i2.24165>.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*). Data sekunder dalam bentuk APBD tahun 2004-2013 dan realisasinya, PDRB Kabupaten Bombana, dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana tahun 2004-2013. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka akan turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Efektifitas PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang bermakna bahwa semakin besar efektifitas atau pencapaian target PAD maka akan meningkatkan alokasi belanja modal sehingga turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Keserasian belanja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia bermakna bahwa semakin besar anggaran belanja untuk masyarakat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia bermakna bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.⁷⁷

⁷⁷ Filasti Yunarsi Rahma, Wilda Fatmala, and Dewi Yulianti, "Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 55–61, <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>.

6. Anindita Trinura Novitasari, *Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah*, 2022, *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, Bangkalan.

Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan mewawancarai pada pelaku usaha UMKM khususnya di lokasi penelitian dan didukung data sekunder dari informasi dinas terkait yang bertujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa UMKM merupakan pilar perekonomian dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian serta menjadi stabilisator perekonomian selepas masa krisis ekonomi maupun selepas masa pandemi. Kedua, kemajuan teknologi informasi menuntut pelaku usaha untuk lebih familiar dengan berbagai platform pemasaran online dengan harapan dapat meningkatkan volume penjualan serta memberi harapan untuk keberlangsungan UMKM tetap eksis kedepannya. Ketiga, Pemerintah sebagai pihak pemangku kebijakan perlu terus melakukan program dan kegiatan untuk mendukung industri ekonomi kreatif terus tumbuh, sumber daya manusia dengan skill yang lebih baik, kualitas industri kreatif yang bisa meluas serta dikenal masyarakat baik didalam negeri maupun di luar negeri.⁷⁸

7. Ridho Rachman, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang*

⁷⁸ Novitasari, "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah," 184–204.

Selatan Tahun 2011 – 2018), 2020, Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan diuji dengan regresi linier berganda menggunakan aplikasi komputer SPSS 20. Analisis data yang dilakukan yaitu menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan dua rasio, yaitu: rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi per tahunnya dari tahun 2011 – 2018. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa rasio efektivitas PAD Kota Tangerang Selatan sudah sangat efektif, dan rasio efisiensi APBD nya menunjukkan hasil tidak efisien. Namun, kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.⁷⁹

8. Lamazi, *Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan*, 2020, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Medan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data sekunder yang berbentuk time series bersumber dari BPS Sumsel. Untuk jumlah UMKM berasal dari dua sumber yaitu untuk tahun 2010 sampai 2012 diambil dari BPS pusat. Sementara data jumlah UMKM dari tahun 2013 sampai 2017 diambil dari BPS Sumsel. Data berbentuk time series diambil dari tahun 2010 sampai 2017. Sementara pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai PDRB. Populasi dalam penelitian ini sama

⁷⁹ Rachman, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018,” 1–111.

dengan sampelnya yaitu jumlah seluruh UMKM di Sumatera Selatan. Sampel diambil mulai dari tahun 2010 sampai 2017. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa UMKM berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸⁰

9. Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, 2020, GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Mamuju.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, dan alat analisis yang digunakan yaitu Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB atau GNP per kapita. Sedangkan, pertumbuhan UMKM diukur dengan pendapatan PDRB UMKM tiap tahunnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu yaitu UMKM yang sudah ada atau yang sudah lama bergerak didalamnya dan adapun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju.⁸¹

10. Rizky Utami, dan Rochiyati Murniningsih, *Pengaruh Modal Sosial dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi Pada*

⁸⁰ Lamazi, "Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan," 103–8.

⁸¹ Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," 157–72.

UMKM Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang), 2020, Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology, Magelang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dan dianalisis menggunakan SPSS 20 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial, dan karakter pribadi seorang wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.⁸²

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agis Eles Sevigo, dan Nurul Lathifah, <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022</i> , (2024)	Tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efisiensi APBD tidak terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah	a. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan data sekunder b. Variabel Independen menggunakan kinerja keuangan c. Variabel dependen menggunakan pertumbuhan ekonomi d. Pengukuran	a. Kategori penelitian menggunakan deskriptif b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening

⁸² Rizky Utami and Rochiyati Murniningsih, "Pengaruh Modal Sosial Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi Pada UMKM Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang)," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, no. 1 (2020): 664–69, <https://bit.ly/3OTb9zl>.

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara simultan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB f. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD	
2.	Sulistyo Budi Utomo, Yenik Pujowati, dan Eva Yuniarti Utami, <i>Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis pada Komunitas UMKM di Jawa Timur</i> , (2024)	Temuan-temuan menggarisbawahi dampak positif yang signifikan dari kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis di komunitas UMKM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan peraturan yang mendukung, akses ke sumber daya keuangan, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan	a. Metode penelitian menggunakan kuantitatif b. Fokus utama mengenai peran pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM c. Adanya penggunaan variabel UMKM	a. Variabel independen menggunakan kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		keberlanjutan UMKM		
3.	Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika, dan Angga Permadi Karpriana, <i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022</i> , (2024)	Kinerja keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Hal ini bertentangan dengan H1, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Belanja Modal. Hal ini bertentangan dengan H2, yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh Belanja Modal	a. Menggunakan variabel Kinerja Keuangan Daerah b. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif c. Menggunakan data sekunder dengan teknik <i>time series</i> e. Menggunakan data Realisasi PAD dengan rentang Tahunan f. Menggunakan teknik sampel jenuh	a. Menggunakan uji statistik SPSS 26 b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening
4.	Dedy Febry Rachman, dan Syaiful Amri, <i>Studi Literatur Pengaruh Kinerja Keuangan</i>	Kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh Rasio Kemandirian, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan	a. Metode penelitian menggunakan kuantitatif b. Menggunakan variabel Kinerja keuangan	a. Menggunakan uji statistik SPSS 25 b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombok Timur Sebelum Covid 19, (2023)</i></p>	<p>dapat ditolak. Kinerja keuangan daerah, khususnya Rasio Efektivitas, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. Kinerja Keuangan Daerah, melibatkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Pertumbuhan Ekonomi, tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat Pengangguran dan dapat ditolak. Kinerja Keuangan Daerah, khususnya Rasio Kemandirian, tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran</p>	<p>Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>c. Data yang diambil menggunakan rentang data tahunan</p> <p>d. Metode yang diterapkan menggunakan analisis jalur (<i>Path Analysis</i>)</p>	

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak. Kinerja Keuangan Daerah, terutama Rasio Efektivitas, berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat diterima. Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi dan dapat ditolak.</p>		
5.	<p>Filasti Rahma, Yunarsi, Wilda Fatmala, dan Dewi Yulianti, <i>Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Indeks</i></p>	<p>kemandirian fiskal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Efektifitas PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Keserasian belanja berpengaruh terhadap indeks pembangunan</p>	<p>a. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif b. Variabel yang digunakan Kinerja Keuangan Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi c. Menggunakan data sekunder dengan data runtut waktu</p>	<p>a. Menggunakan uji statistik SPSS 23 b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening</p>

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pembangunan Manusia, (2022)</i>	manusia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia	(time series) atau tahunan d. Kinerja keuangan menggunakan data APBD dan realisasinya e. Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB f. Metode untuk mengumpulkan data menggunakan dokumentasi	
6.	Anindita Trinura Novitasari, <i>Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah, (2022)</i>	UMKM merupakan pilar perekonomian dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian serta menjadi stabilisator perekonomian selepas masa krisis ekonomi maupun selepas masa pandemi. Kedua, kemajuan teknologi informasi menuntut pelaku usaha untuk lebih familiar dengan berbagai platform pemasaran online dengan harapan dapat meningkatkan	a. Metode penelitian menggunakan data sekunder b. Variabel independen menggunakan UMKM c. Variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi	a. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan studi literatur b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>volume penjualan serta memberi harapan untuk keberlangsungan UMKM tetap eksis kedepannya. Ketiga, Pemerintah sebagai pihak pemangku kebijakan perlu terus melakukan program dan kegiatan untuk mendukung industri ekonomi kreatif terus tumbuh, sumber daya manusia dengan skill yang lebih baik, kualitas industri kreatif yang bisa meluas serta dikenal masyarakat baik didalam negeri maupun di luar negeri</p>		
6.	<p>Ridho Rachman, <i>Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah</i></p>	<p>Rasio efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Rasio efisiensi PAD berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efektivitas PAD</p>	<p>a. Variabel Independen dan dependen, menggunakan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif</p>	<p>a. Alat untuk menguji menggunakan aplikasi komputer SPSS 20 b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening c. Pendekatan penelitian menggunakan</p>

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018</i> , (2020)	dan rasio efisiensi PAD berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi	c. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi PAD	pendekatan deskriptif kuantitatif
7.	Lamazi, <i>Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan</i> , (2020)	UMKM berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif b. Penggunaan data sekunder yang berbentuk time series c. Variabel Independen menggunakan jumlah UMKM d. Variabel Dependen menggunakan Pertumbuhan Ekonomi e. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai PDRB f. Seluruh populasi sama dengan sampel	a. Tidak adanya penggunaan variabel Kinerja Keuangan b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening
8.	Abdul Halim, <i>Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro</i> ,	Pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap	a. Variabel dependen menggunakan pertumbuhan	a. Variabel independen menggunakan UMKM

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, (2020)</i>	pertumbuhan ekonomi	ekonomi b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif c. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan tingkat PDRB d. Penggunaan variabel pertumbuhan UMKM	b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening
9.	Rizky Utami, dan Rochiyati Murniningsih, <i>Pengaruh Modal Sosial dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi Pada UMKM Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang), (2020)</i>	Modal sosial, dan karakter pribadi seorang wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM	a. Metode penelitian menggunakan kuantitatif b. Adanya penggunaan variabel UMKM	a. Variabel independen menggunakan modal sosial dan karakter pribadi b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening
10.	Sonya Oktara Sabilla, dan Candra Wijayangka, <i>Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pertumbuhan</i>	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha UMKM	a. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif, b. Metode pengambilan sampel menggunakan	a. Variabel independen menggunakan literasi keuangan b. Tidak adanya penggunaan variabel intervening

No	Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Usaha Pada UMKM,</i> (2019)		sampling jenuh c. Adanya penggunaan variabel UMKM	

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

B. Kajian Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

John Maynard Keynes pada tahun 1936 mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai *Keynessian Revolution* (Revolusi Keynesian). Teori Keynes difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri

sebagai variabel strategis dalam mengatasi tidak Bergeraknya faktor-faktor produksi. Permintaan agregat efektif di dalam negeri membentuk pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Teori Keynes dilatarbelakangi oleh situasi depresi pada tahun 1929/1930 sehingga dianggap relevan untuk tujuan stabilisasi jangka pendek dan bukan untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan.

Keynes membuat pernyataannya yang sangat revolusioner dalam ekonomi makro. Argumentasi Keynes yang esensial dibangun

berdasarkan observasi berikut ini. Observasi pertama yaitu, pasar dalam tatanan ekonomi modern dapat terjebak dalam ekuilibrium kekurangan pekerjaan (*underemployment equilibrium*). *Underemployment equilibrium* menunjukkan keseimbangan persediaan dan permintaan agregat tenaga kerja yang produksinya jauh di bawah angkatan kerja potensial, dan sebagian lainnya (di luar kemauannya) tidak mendapatkan pekerjaan. Observasi Keynes yang kedua mengikuti observasinya yang pertama, yaitu melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat mendorong ekonomi dan membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggi-tingginya. Sebagai contoh, jika pemerintah meningkatkan pembelian maka agregat permintaan akan meningkat pula.⁸³

Menurut teori Keynesian, perubahan permintaan agregat diantisipasi atau tidak terduga, akan memiliki efek jangka pendek terbesar pada output riil serta lapangan kerja, dan bukan pada harga. Keynesian percaya bahwa apa yang benar tentang jangka pendek tidak dapat secara langsung disimpulkan akan terjadi pula dalam jangka panjang, sedangkan kita hidup dalam jangka pendek.

Kebijakan moneter dapat meningkatkan output dan kesempatan kerja jika ada harga yang tidak cepat berubah, seperti upah yang tidak langsung berubah. Ketika upah tetap, perubahan kebijakan moneter (misalnya, peningkatan uang beredar) dapat

⁸³ Chalid, "Teori Pertumbuhan," 1.21-1.22.

mendorong permintaan, produksi, dan perekrutan tenaga kerja. Kebijakan moneter hanya berdampak nyata pada output dan lapangan kerja jika ada harga atau upah yang tidak cepat berubah. Jika semua harga fleksibel dan bisa naik atau turun proporsional secara instan, penambahan uang hanya mengubah tingkat harga umum tanpa memengaruhi perekonomian riil

Keynesian percaya bahwa harga atau upah yang tidak cepat berubah membuat perubahan pada pengeluaran (konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah) langsung memengaruhi output riil, bukan hanya harga. Jika pemerintah meningkat belanja, misalnya, dan semua komponen lain dari pengeluaran tetap konstan, maka output akan meningkat. Model Keynesian mencakup konsep efek multiplier, yang menunjukkan bahwa perubahan dalam pengeluaran (seperti konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah) dapat menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dari perubahan awal tersebut.⁸⁴

Kerangka analisis Keynes kemudian mempengaruhi teori pertumbuhan yang dikembangkan sejak Perang Dunia II. Kerangka pemikiran Keynes yang menjadi formula bagi pembentukan teorinya kemudian disebut Neo-Keynes. Roy Harrod tahun 1948 dan Evsey Domar tahun 1957 menggunakan pemikiran Keynes untuk memformulasikan proses pembangunan jangka panjang dengan

⁸⁴ Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, 75–76.

mengemukakan teori mengenai hubungan antara tingkat tabungan dan tingkat investasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan jelas menunjukkan ciri-ciri pokok pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konseptualisasinya maupun perincian modelnya. Teori Harrod menekankan bahwa pada proses pertumbuhan melekat suatu faktor ketidakstabilan yang menjadi gangguan terhadap kondisi ekuilibrium. Teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus

Harrod-Domar yang sangat terkenal hingga kini.⁸⁵

Melalui teori pertumbuhan ekonomi diatas membuat peneliti dapat menentukan permasalahan yang harus diteliti yaitu berdasarkan teori yang ada Keynes menekankan bahwa permintaan agregat yang efektif salah satunya dengan pengeluaran pemerintah untuk menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dimana, teori Keynes memberikan landasan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dalam mendukung pembiayaan terhadap sektor-sektor yang menimbulkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, salah satunya seperti

⁸⁵ Chalid, "Teori Pertumbuhan," 1.22-1.23.

UMKM. Yang disisi lain juga akan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, dan permintaan agregat akan meningkat pula.

2. Teori Keunggulan Komparatif (*Theory of Comparative Advantage*)

Teori keunggulan komparatif (*theory of comparative advantage*) merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Penjelasan mengenai hukum keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* tahun 1817.

Menurut hukum keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara A misalnya harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (yang merupakan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut cukup besar (komoditi yang memiliki kerugian komparatif). Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya

jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi.⁸⁶

Spesialisasi adalah metode produksi yang mana suatu entitas berfokus pada produksi barang dalam lingkup terbatas untuk memperoleh tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Banyak negara, misalnya, mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang merupakan produk asli dari wilayah mereka, dan memperdagangkannya dengan barang dan jasa lain.⁸⁷ Contohnya seperti Jepang yang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil bermerek seperti Honda dan Suzuki.

Seperti halnya suatu negara, teori yang dikatakan David Richardo mengenai dengan melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi, akan dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan negara. Hal tersebut juga dapat berlaku pada suatu daerah. Seperti di Kabupaten Jember yang salah satu peranan terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,89 persen pada tahun 2023 (meningkat dari 14,77 persen di tahun 2022).⁸⁸ Kegiatan perdagangan yang dimaksud dapat dilakukan dengan menjual kembali barang-barang, baik barang baru maupun bekas yang bernilai jual

⁸⁶ Abdul Wahab, *Ekonomi Internasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2017), 35–36.

⁸⁷ Will Kenton, “Specialization,” Investopedia, 2022, <https://www.investopedia.com/terms/s/specialization.asp>.

⁸⁸ BPS, *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023*, 74.

tinggi kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, kios, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, dll.⁸⁹ Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan UMKM, yang menjadikan Kabupaten Jember selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan juga memiliki beberapa produk unggulan dari UMKM.

3. Kinerja Keuangan

Menurut Suprpto dalam Ambya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.⁹⁰

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan

⁸⁹ BPS, 43.

⁹⁰ Ambya, *Ekonomi Keuangan Daerah*, 94.

yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.⁹¹

Kinerja keuangan daerah ini dapat dilihat hasilnya dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahmudi yang menyatakan bahwa laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa diberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, baik itu sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.⁹²

a. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk:

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya skema yang disepakati.

⁹¹ Ambya, 95.

⁹² Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 89.

- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan Indikator kinerja yang telah disepakati.
- 5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja Organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan Instansi Pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.⁹³

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan

⁹³ Dr Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah.Pdf* (Makassar: De La Macca, 2018), 262–63.

faktor – faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).⁹⁴

Sedangkan Simon Kuznets dalam Mulyati menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan output (hasil produksi ekonomi) berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, akan dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Hal ini

⁹⁴ Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: (GP Press) Gaung Persada, 2008), 103.

menunjukkan adanya tiga komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru.⁹⁵

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (*GDP/Gross Domestic Product*) dan sisi jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total di bagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak dapat tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Karena dengan hanya mengkaitkan kedua aspek tersebut maka perkembangan output per kapita dapat dijelaskan juga.⁹⁶

5. Pertumbuhan UMKM

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

⁹⁵ Sri Nur Mulyati, *Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Kelas Xi, Modul Ekonomi Kelas XI KD 3.2 Dan 4.2* (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 3.

⁹⁶ Chalid, "Teori Pertumbuhan," 1.3-1.4.

UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.⁹⁷

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

⁹⁷ Sri Handini, Sukei, and Hartati Kanty, *Manajemen UMKM Dan Koperasi, Manajemen : UMKM Dan Koperasi* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 19.

tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil.⁹⁸

Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, Tiktik menyebutkan UMKM dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*: UMKM yang termasuk ke dalam kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku usaha di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia, jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.
- 2) *Micro Enterprises*: UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UMKM ini di Indonesia relatif besar.
- 3) *Small Dynamic Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini biasanya memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dibina dengan baik, sebagian UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM pada kategori I dan 2. Kelompok UKM ini sudah dapat menerima pekerjaan sub-kontak dan ekspor.

⁹⁸ Handini, Sukesi, and Kanty, 21.

4) *Fast Moving Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini, akan muncul usaha skala menengah dan besar.⁹⁹

Sebagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan pemuda, yang salah satunya adalah kegiatan bantuan bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). Bantuan bagi WMP dan SKP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 51, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Dengan program ini diharapkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul, dan berdaya saing bisa lebih cepat.¹⁰⁰

Menurut Novitasari peran penting dimiliki UMKM dalam memopang pertumbuhan ekonomi. Memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja serta menjadi sektor yang dapat mendistribusi hasil pembangunan. Sebagai sektor usaha yang diunggulkan Bank Indonesia serta kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM harus terus eksis serta didukung pemerintah dalam pertumbuhannya serta tertanamkannya masyarakat yang sadar UMKM

⁹⁹ Handini, Sukesi, and Kanty, 28–29.

¹⁰⁰ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 268.

melalui bantuan pendanaan, kemudahan pengurusan surat ijin usaha, bantuan pendampingan, pelatihan yang bersifat membangun dan mendorong kemajuan UMKM kedepannya.¹⁰¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰¹ Novitasari, "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah," 189–90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah uraian yang berisikan tentang pendekatan penelitian yang dipilih.¹⁰² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.¹⁰³ Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan.

B. Populasi dan Sampel

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, yang bertujuan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁰⁴ Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh dilakukan jika anggota populasi terlalu sedikit, oleh sebab itu semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.¹⁰⁵ Roscoe tahun 1975 dalam Sugiyono menyatakan bahwa ukuran sampel yang tepat untuk kebanyakan penelitian adalah lebih dari 30, tetapi untuk penelitian eksperimen sederhana, ukuran sampel antara 10-20 masih diperbolehkan.¹⁰⁶ Dalam konteks populasi yang sangat kecil, penelitian populasi (total sampling)

¹⁰² Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 41.

¹⁰³ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 6.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 81.

¹⁰⁵ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 36.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 91.

dapat dilakukan meskipun jumlah sampel kurang dari 10, karena seluruh populasi diambil sebagai sampel.¹⁰⁷

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰⁸ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁰⁹ Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa LRA (Laporan Realisasi Anggaran) pada tahun 2017-2023 yang diambil di BPKAD Kabupaten Jember, data ekonomi berupa tingkat PDRB pada tahun 2017-2023 yang diambil di BPS Kabupaten Jember, dan data UMKM berupa jumlah UMKM per tahunnya pada tahun 2017-2023 yang diambil di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum).

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data

¹⁰⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, "Menentukan Jumlah Sampel Dalam Penelitian," *12 Februari* (Padang, 2019), <https://www.uinsyahada.ac.id/bagaimana-menentukan-jumlah-sampel-dalam-penelitian/4/>.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 80.

¹⁰⁹ Sugiyono, 81.

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹¹⁰ Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh data dari kantor BPKAD Kabupaten Jember dan Diskopum Kabupaten Jember. Untuk tingkat PDRB didapat dari website BPS Kabupaten Jember.

D. Analisis Data

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dari Rasio Efektivitas PAD menurut Mahmudi dikategorikan pada tabel 3.1 dibawah:¹¹¹

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

¹¹⁰ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), 147.

¹¹¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 141.

b. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

Rumus rasio efisien sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dari Rasio Efisiensi PAD menurut Mahmudi dikategorikan pada tabel 3.2 dibawah:¹¹²

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Efisiensi PAD

< 10%	Sangat Efisien
10% – 20%	Efisien
21% – 30%	Cukup Efisien
31% – 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun

¹¹² Mahmudi, 142.

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).¹¹³ Berikut rumus untuk menghitung PDRB:

$$G_t = \frac{Y_{r_t} - Y_{r_{t-1}}}{Y_{r_{t-1}}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t : pertumbuhan ekonomi tahun t

Y_{r_t} : pendapatan nasional tahun t

$Y_{r_{t-1}}$: pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik. Berikut ketentuan dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov:

- 1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.¹¹⁴

¹¹³ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2017-2021*, ed. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (Sidoarjo: PT. Sinar MMurni Indo Printing, 2022), 3.

¹¹⁴ Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 69.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) lainnya. Model regresi yang baik, jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (tidak terjadi gejala multikolinieritas).¹¹⁵ Jika nilai VIF semakin membesar, maka diduga ada Multikolinieritas antar variabel independen atau jika VIF melebihi angka 10 maka bisa disimpulkan ada Multikolinieritas).¹¹⁶

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.¹¹⁷ Untuk pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan model Glejser yaitu:

¹¹⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 107.

¹¹⁶ Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 70.

¹¹⁷ Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 137.

- 1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heterokedastisitas.
- 2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data ada Heterokedastisitas.¹¹⁸

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.¹¹⁹

Uji autokorelasi pada model ini dilakukan dengan menggunakan Run Test. Kriteria pengukuran untuk mengetahui data tersebut terdapat masalah autokorelasi atau tidak yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Asymp.sig). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat masalah autokorelasi,

¹¹⁸ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 70.

¹¹⁹ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 111–12.

sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi.¹²⁰

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Statistik uji t, disebut juga uji parsial merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.¹²¹ Untuk mengambil keputusan dalam uji koefisien regresi secara parsial (Uji t dan Uji Signifikansi) dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ Tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.

2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ Tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.¹²²

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan R^2 pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model

¹²⁰ Monika Palupi Murniati et al., *Alat-Alat Pengujian Hipotesis*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 15 (Semarang: Unika Soegijapranata, 2013), 57 & 82.

¹²¹ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 53–54.

¹²² Abdul Muhid, *Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*, ed. Dona Nur Hidayat, *Zifatama Jawara*, Edisi Kedu (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), 16–17.

regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin R^2 kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.¹²³

6. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan alat bantu software SPSS 27. Analisis Jalur (*path analysis*) adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan kompleks antara berbagai variabel dalam sebuah model. Tujuan utama dari analisis jalur adalah untuk memahami bagaimana variabel-variabel saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu rangkaian hubungan.

Dalam analisis jalur, variabel-variabel dibuat menjadi simpul-simpul dalam suatu jaringan (*path diagram*) yang menggambarkan hubungan antara mereka. Kemudian, dengan menggunakan teknik statistik, analisis jalur memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel dan mengidentifikasi hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel-variabel, menilai sejauh mana model yang dibangun sesuai dengan data yang diamati. Analisis jalur berguna dalam penelitian untuk memahami kompleksitas hubungan antarvariabel dan memvalidasi

¹²³ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 54.

teori-teori yang melibatkan banyak faktor. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.¹²⁴ Berikut pola model struktur analisis jalur:

- a. Model I : $\rho X_1 Z + \rho X_2 Z + \rho Z_{\epsilon 1}$
- b. Model II : $\rho X_1 Y + \rho X_2 Y + \rho Z Y + \rho Y_{\epsilon 2}$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

Z : Pertumbuhan UMKM

X₁ : Rasio Efektivitas PAD

X₂ : Rasio Efisiensi PAD

ρ : Koefisien Regresi

$Y_{\epsilon 1}$: Variabel lainnya yang mempengaruhi Y

$Z_{\epsilon 2}$: Variabel lainnya yang mempengaruhi Z

7. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel tahun 1982 dan dikenal dengan Uji Sobel (*Sobel Test*). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M. Pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow M$ (a) dengan jalur $M \rightarrow Y$ (b) atau ab. Standard error koefisien a dan b

¹²⁴ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, "Metode Penelitian," in *Metodologi Penelitian*, ed. Mahir Pradana (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), 469, <https://www.researchgate.net/publication/382052369>.

ditulis dengan s_a dan s_b dan besarnya sandard error pengaruh tidak langsung (*inderrect effect*) adalah s_{ab} yang dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$s_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2 + s_a^2 s_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{s_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.¹²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 10th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), 276–77.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang secara administrasi berada di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari. Ketiga kecamatan tersebut adalah pecahan dari Kecamatan Jember yang dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976.¹²⁶

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas BPKAD sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2023 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Tugas tersebut dapat meliputi

¹²⁶ “Kabupaten Jember,” accessed February 21, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember.

menyiapkan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, penyajian informasi keuangan dan aset daerah, dan lainnya, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.¹²⁷

2. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Jember

Visi dari BPKAD Kabupaten Jember yaitu: “Terciptanya Pelayanan aparatur Pemerintah yang kretaif, bersih, dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat”. Sedangkan Misi dari BPKAD Kabupaten Jember, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang kreatif dan berkualitas
- b. Memberdayakan pendidikan yang formal dan informal
- c. Mengembangkan potensi daerah secara optimal
- d. Menekankan angka kemiskinan dan pengangguran
- e. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan¹²⁸

3. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jember

Struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada Gambar 4.1¹²⁹

¹²⁷ Database Peraturan BPK, “Perbup No 8 Th 2023 KSOTK BPKAD” (Jember: Database Peraturan BPK, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287993/perbup-kab-jember-no-8-tahun-2023>.

¹²⁸ “Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Susunan Tata Kelola Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember),” accessed February 21, 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/bkpad>.

¹²⁹ BPK, “Perbup No 8 Th 2023 KSOTK BPKAD.”

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kab. Jember Tahun 2023

B. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertumbuhan Ekonomi, dan Laporan Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember dari tahun 2017 – 2023. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi dapat disajikan pada Tabel 4.1 – 4.9

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
LRA Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.540.406.991.356,11	Rp3.480.086.187.354,78	98,3
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 736.927.109.103,11	Rp 719.213.581.070,78	97,6
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.792.666.710.753,00	Rp 2.748.823.132.916,00	98,43
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 10.813.171.500,00	Rp 12.049.473.368,00	111,43
5	BELANJA	Rp4.165.967.661.140,59	Rp3.142.888.255.514,79	85,32
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.251.506.923.545,39	Rp 2.430.751.180.330,78	74,76
7	BELANJA MODAL	Rp 906.194.637.595,20	Rp 708.870.975.148,01	78,23
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 8.266.100.000,00	Rp 3.266.100.000,00	39,51
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 21.994.853.252,11	Rp 415.486.800.630,00	1.889,02
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 647.555.523.036,59	-Rp 78.288.868.790,01	12,09

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 337.197.931.839,99. Namun terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember defisit sebesar -Rp. 78.288.868.790,01.

2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
LRA Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.601.294.429.685,50	Rp3.588.873.174.515,37	99,66
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 609.304.818.610,50	Rp 597.509.388.023,37	98,06
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.811.648.326.385,00	Rp 2.813.783.402.499,00	100,08
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 180.341.284.690,00	Rp 177.580.383.993,00	98,47
5	BELANJA	Rp3.717.874.336.944,97	Rp3.005.346.851.544,72	80,84
6	BELANJA OPERASI	Rp 2.930.365.284.848,40	Rp 2.469.099.279.895,48	84,26
7	BELANJA MODAL	Rp 783.509.052.096,57	Rp 523.247.571.649,24	67,93
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00	100
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 445.750.603.987,00	Rp 444.750.603.987,00	99,78
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 562.330.511.246,47	Rp 138.775.718.983,65	-24,68

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 583.526.322.970,65. Lalu terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 138.775.718.983,65.

3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
LRA Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.866.530.712.878,46	Rp3.815.931.626.881,96	98,69
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 662.481.418.206,46	Rp 667.598.426.909,96	100,77
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 3.030.598.569.982,00	Rp 2.961.401.173.862,00	97,72
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 173.450.724.690,00	Rp 186.932.026.110,00	107,77
5	BELANJA	Rp4.059.339.811.197,36	Rp3.379.816.155.289,86	83,26
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.100.229.457.086,94	Rp 2.648.219.127.460,13	85,42
7	BELANJA MODAL	Rp 954.110.354.110,42	Rp 731.597.027.829,70	76,68
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 5.000.000.000,00	Rp -	0
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 498.350.614.460,22	Rp 497.096.422.984,22	99,75
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 691.159.712.779,12	-Rp 60.980.951.392,12	8,82

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 436.115.471.592,10. Namun terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember defisit sebesar -Rp. 60.980.951.392,12.

4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
LRA Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.665.003.964.118,68	Rp3.531.439.425.487,65	96,36
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 660.367.999.055,62	Rp 593.175.154.485,65	89,82
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.781.987.289.998,00	Rp 2.745.916.417.419,00	98,7
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 222.648.675.065,06	Rp 192.347.853.583,00	86,39
5	BELANJA	Rp3.777.841.796.797,66	Rp2.803.531.977.132,74	74,21
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.058.608.579.647,11	Rp 2.537.125.944.923,41	82,95
7	BELANJA MODAL	Rp 318.233.217.150,55	Rp 188.310.951.430,71	59,17
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 401.000.000.000,00	Rp 78.095.080.778,62	19,48
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 494.079.687.160,22	Rp 494.079.687.160,22	100,00
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 606.917.519.839,20	Rp 233.827.761.194,69	-38,53

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2020 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 727.907.448.354,91. Lalu terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 233.827.761.194,69.

5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
LRA Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.681.432.575.560,00	Rp3.565.326.116.830,38	96,85
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 719.879.915.600,00	Rp 635.305.965.623,24	88,25
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.743.316.319.429,00	Rp 2.732.490.484.028,14	99,61
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 218.236.340.531,00	Rp 197.529.667.179,00	90,51
5	BELANJA	Rp3.897.571.237.944,00	Rp3.286.194.089.693,21	
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.121.862.751.642,00	Rp 2.718.701.856.568,55	87,09
7	BELANJA MODAL	Rp 735.350.920.728,00	Rp 552.082.443.567,66	75,08
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 40.357.565.574,00	Rp 15.409.789.557,00	38,18
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 519.761.150.084,00	Rp 445.432.626.283,22	85,48
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 735.899.812.468,00	-Rp 166.300.599.146,05	22,6

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 279.132.027.137,17. Namun terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember defisit sebesar -Rp. 166.300.599.146,05.

6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
LRA Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.852.241.731.262,00	Rp3.715.160.123.903,32	96,44
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 694.849.881.962,00	Rp 640.243.830.361,32	92,14
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 3.115.610.203.172,00	Rp 3.046.281.464.109,00	97,77
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 41.781.646.128,00	Rp 28.634.829.433,00	68,53
5	BELANJA	Rp3.908.787.552.613,00	Rp3.651.164.138.289,37	
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.048.139.447.557,00	Rp 2.820.371.422.542,46	92,53
7	BELANJA MODAL	Rp 855.741.991.069,00	Rp 829.309.474.596,91	96,91
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 4.906.113.987,00	Rp 1.483.241.150,00	30,23
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 512.974.004.469,00	Rp 512.197.463.727,00	99,85
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 569.519.825.820,00	-Rp 448.201.478.113,05	78,7

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2022 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 63.995.985.613,95. Namun terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember defisit sebesar -Rp. 448.201.478.113,05.

7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7
LRA Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	Rp3.996.941.711.054,00	Rp3.957.426.651.267,85	99,01
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 845.987.143.485,00	Rp 764.496.302.893,85	90,37
3	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 3.149.862.264.569,00	Rp 3.191.994.244.040,00	101,34
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 1.092.303.000,00	Rp 936.104.334,00	85,7
5	BELANJA	Rp3.594.540.712.685,00	Rp3.279.577.948.200,92	
6	BELANJA OPERASI	Rp 3.288.813.950.585,00	Rp 3.015.559.884.677,66	91,69
7	BELANJA MODAL	Rp 260.564.465.920,00	Rp 232.163.748.376,26	89,1
8	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 45.162.296.180,00	Rp 31.854.315.147,00	70,53
9	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 523.738.946.077,00	Rp 522.644.113.477,00	99,79
10	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 121.337.947.708,00	Rp 155.204.589.589,93	92,33

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Dari Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Jember berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang juga berada lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2023 ini posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 677.848.703.066,93. Lalu terdapat transfer/bagi hasil ke desa yang membuat posisi APBD Kabupaten Jember surplus sebesar Rp. 155.204.589.589,93.

4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

Laporan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember periode 2017 - 2023 dapat dilihat grafik pada Gambar 4.2

Gambar 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2023

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2025

Dari Gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember cenderung mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mulai pulih yang diikuti pada tahun 2022 dan tahun 2023.

5. Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember

Laporan Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember periode 2017 – 2023 dapat dilihat grafik pada Gambar 4.3

Gambar 4.3
Pertumbuhan UMKM Tahun 2017 – 2023

Sumber: Diskopum Kabupaten Jember, 2025

Dari Gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan UMKM sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan hal ini merupakan angka tertinggi selama periode 2017 – 2023.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis Kinerja Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Jember dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan kinerja dari BPKAD Kabupaten Jember selama tujuh tahun sejak 2017 – 2023. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD

Hasil penghitungan dari Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Penghitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	Rp 719.213.581.070,78	Rp 736.927.109.103,11	98%	Cukup Efektif
2018	Rp 597.509.388.023,37	Rp 609.304.818.610,50	98%	Cukup Efektif
2019	Rp 667.598.426.909,96	Rp 662.481.418.206,46	101%	Sangat Efektif
2020	Rp 593.175.154.485,65	Rp 660.367.999.055,62	90%	Cukup Efektif
2021	Rp 635.305.965.623,24	Rp 719.879.915.600,00	88%	Kurang Efektif
2022	Rp 640.243.830.361,32	Rp 694.849.881.962,00	92%	Cukup Efektif
2023	Rp 764.496.302.893,85	Rp 845.987.143.485,00	90%	Cukup Efektif
Rata-rata			94%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (diolah)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Jember dari tahun 2018 – 2023 sudah cukup efektif dengan rasio di atas 90%. Rasio Efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 101% sedangkan Rasio Efektivitas PAD terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 88% dengan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Jember dari tahun 2017 – 2023 sebesar 94%.

2. Rasio Efisiensi PAD

Hasil penghitungan dari Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9
Penghitungan Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD / Total Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Keterangan
2017	Rp 3.142.888.255.514,79	Rp 719.213.581.070,78	437%	Tidak Efisien
2018	Rp 3.005.346.851.544,72	Rp 597.509.388.023,37	503%	Tidak Efisien
2019	Rp 3.379.816.155.289,86	Rp 667.598.426.909,96	506%	Tidak Efisien
2020	Rp 2.803.531.977.132,74	Rp 593.175.154.485,65	473%	Tidak Efisien
2021	Rp 3.286.194.089.693,21	Rp 635.305.965.623,24	517%	Tidak Efisien
2022	Rp 3.651.164.138.289,40	Rp 640.243.830.361,32	570%	Tidak Efisien
2023	Rp 3.279.577.948.200,92	Rp 764.496.302.893,85	429%	Tidak Efisien
Rata-rata			491%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (diolah)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Jember dari tahun 2017 – 2023 tidak efisien dengan rasio di atas 100%. Rasio Efisiensi PAD terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 429% sedangkan Rasio Efisiensi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 570% dengan rata-rata Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Jember dari tahun 2017 – 2023 sebesar 491%.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Terdapat empat macam uji dalam uji asumsi klasik pada penelitian ini yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan pada analisis regresi. Penelitian ini juga terdapat dua kali uji asumsi klasik karena ada dua model yang diuji. Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini dilakukan untuk melihat data yang telah terkumpul berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam

penelitian ini pengujian dilakukan dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS 27.

Kriteria pengukuran untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak melihat dari nilai signifikansi (Asymp.sig). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi dengan normal, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.¹³⁰ Hasil Uji Normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 4.11

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas Model I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		20,87005515
Most Extreme Differences	Absolute		,302
	Positive		,302
	Negative		-,158
Test Statistic			,302
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,052
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,050
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,044
		Upper Bound	,056

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1502173562.

¹³⁰ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 69.

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,052 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas Model II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		7	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,75948984	
Most Extreme Differences	Absolute	,225	
	Positive	,147	
	Negative	-,225	
Test Statistic		,225	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,359	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,347
		Upper Bound	,371

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 743671174.

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel bebas (independen) dengan variabel bebas lainnya memiliki hubungan yang linier atau tidak. Penelitian yang baik, tidak adanya hubungan yang linier antar variabel bebasnya atau dengan kata lain, tidak terdapat gejala multikolinieritas.¹³¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan hasil pada Tabel 4.12 dan 4.13

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas Model I

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	RASIO EFEKTIVITAS PAD	,999	1,001
	RASIO EFISIENSI PAD	,999	1,001

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN UMKM

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance > 0,10 dengan nilai VIF < 10, maka data disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah atau tidak terjadi gejala multikolinieritas.

¹³¹ Sahir, 70.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas Model II

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	RASIO EFEKTIVITAS PAD	,897	1,114
	RASIO EFISIENSI PAD	,978	1,023
	PERTUMBUHAN UMKM	,885	1,130

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance > 0,10 dengan nilai VIF < 10, maka data disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah atau tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik jika tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, penulis mengolah menggunakan SPSS dengan model Glejser.¹³²

Kriteria pengukuran untuk mengetahui data tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak melihat dari nilai signifikansi (Asymp.sig). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai

¹³² Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 137.

signifikansi $< 0,05$ maka terdapat masalah heteroskedastisitas.¹³³

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 4.14 dan 4.15

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	252,566	113,802		2,219	,091
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	-199,778	104,943	-,656	-1,904	,130
	RASIO EFISIENS I PAD	-10,597	10,824	-,337	-,979	,383

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.14 di atas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1) sebesar 0,130, dan variabel Rasio Efisiensi PAD (X_2) sebesar 0,383. Karena nilai kedua variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

¹³³ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 70.

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,397	1,916		-2,817	,067
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	4,422	1,713	,690	2,581	,082
	RASIO EFISIENSI PAD	,387	,169	,585	2,286	,106
	PERTUMBUHAN UMKM	,000	,004	-,033	-,122	,910

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.15 di atas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1) sebesar 0,085, variabel Rasio Efisiensi PAD (X_2) sebesar 0,106 dan variabel Pertumbuhan UMKM (Z) sebesar 0,910. Karena nilai ketiga variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$

(sebelumnya).¹³⁴ Penelitian ini memerlukan uji autokorelasi karena data yang digunakan berupa time series berupa Laporan Realisasi Anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan UMKM selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2017 – 2023. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Model yang digunakan dalam uji autokorelasi ini berupa model Runs Test. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.16 dan 4.17

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi Model I

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,33329
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	6
Z	,910
Asymp. Sig. (2-tailed)	,363

a. Median

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,363 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

¹³⁴ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 111–12.

Tabel 4.17
Hasil Uji Autokorelasi Model II

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,14080
Cases < Test Value	3
Cases $\geq$ Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	3
Z	-,788
Asymp. Sig. (2-tailed)	,431

b. Median

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,431 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Model I

1) Uji Parsial (Uji-t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria untuk mengambil keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.

b) Jika t hitung $< t$ tabel dan signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.¹³⁵ Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.18

Tabel 4.18
Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model I

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	192,172	224,362		,857	,440
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	-138,820	206,895	-,316	-,671	,539
	RASIO EFISIENSI PAD	-6,186	21,339	-,136	-,290	,786

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN UMKM

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Rasio Efektivitas PAD

Variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1) memiliki nilai koefisien regresi (B) yaitu sebesar -138,820 bernilai negatif dan memiliki nilai t hitung sebesar $-0,671 < T$ tabel

¹³⁵ Muhid, *Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*.

yaitu 2,353 serta memiliki nilai sig sebesar $0,539 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM, atau H_1 ditolak.

b) Rasio Efisiensi PAD

Variabel Rasio Efisiensi PAD (X_2) memiliki nilai koefisien regresi (B) yaitu sebesar -6,186 bernilai negatif dan memiliki nilai t hitung sebesar $-0,290 < T$ tabel yaitu 2,353 serta memiliki nilai sig $0,786 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM, atau H_2 ditolak.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase variabel independen terhadap variabel dependen. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin R^2 kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.¹³⁶ Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19

¹³⁶ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 54.

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,221	-,168	3,23752

b. Predictors: (Constant), RASIO EFISIENSI PAD, RASIO EFEKTIVITAS PAD

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dari Tabel 4.19 di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar -0,168 atau -16,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model I ini yaitu variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1), dan Rasio Efisiensi PAD (X_2) mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan UMKM (Z) sebesar -16,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

b. Analisis Regresi Model II

1) Uji Parsial (Uji-t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria untuk mengambil keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ Tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.

b) Jika t hitung $< t$ Tabel dan signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.¹³⁷ Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.20

Tabel 4.20
Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,015	10,256		-,196	,857
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	10,504	9,170	,177	1,145	,335
	RASIO EFISIENSI PAD	-,058	,906	-,010	-,064	,953
	PERTUMBUHAN UMKM	-,121	,021	-,899	-5,774	,010

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Rasio Efektivitas PAD

Variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1) memiliki nilai koefisien regresi (B) yaitu sebesar 10,504 bernilai positif

¹³⁷ Muhid, *Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*, 16–17.

dan memiliki nilai t hitung sebesar $1,145 < T$ tabel yaitu 2,353 serta memiliki nilai sig sebesar $0,335 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, atau H_3 diterima.

b) Rasio Efisiensi PAD

Variabel Rasio Efisiensi PAD (X_2) memiliki nilai koefisien regresi (B) yaitu sebesar -0,058 bernilai negatif dan memiliki nilai t hitung sebesar $-0,064 < T$ tabel yaitu 2,353 serta memiliki nilai sig $0,953 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, atau H_4 ditolak.

c) Pertumbuhan UMKM

Variabel Pertumbuhan UMKM (Z) memiliki nilai koefisien regresi (B) yaitu sebesar -0,121 bernilai negatif dan memiliki nilai t hitung sebesar $-5,774 < T$ tabel yaitu 2,353 dan nilai sig $0,010 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, atau H_5 ditolak.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase variabel independen

terhadap variabel dependen. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin R^2 kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.¹³⁸ Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.21

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model II

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,967 ^a	,936	,871	1,07408

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN UMKM, RASIO EFISIENSI PAD, RASIO EFEKTIVITAS PAD

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dari Tabel 4.21 di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,871 atau 87,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model II ini yaitu variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1), Rasio Efisiensi PAD (X_2), dan Pertumbuhan UMKM (Z) mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 87,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

¹³⁸ Sahir, *Metodol. Penelit.*, 54.

5. Path Analysis (Analisis Jalur)

a. Koefisien Jalur Model I

Dapat dilihat pada output regresi model I, diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* pada tabel Model Summary adalah sebesar -0,168, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X_1 (Rasio Efektivitas PAD), dan X_2 (Rasio Efisiensi PAD) terhadap Z (Pertumbuhan UMKM) sebesar -16,8%. sementara sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai e_1 dapat dicari dengan menggunakan rumus $e_1 = \sqrt{(1 - (-0,168))} = 1,081$. Dengan demikian gambar diagram jalur Model I sebagai berikut:

Gambar 4.4
Diagram Jalur Model I

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

b. Koefisien jalur Model II

Dapat dilihat pada output regresi model II, diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* pada tabel Model Summary adalah sebesar 0,871, hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi X_1 (Rasio Efektivitas PAD), X_2 (Rasio Efisiensi PAD), dan Z (Pertumbuhan UMKM) terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 87,1% sementara sisanya 12,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai e_2 dapat dicari dengan menggunakan rumus $e_2 = \sqrt{(1 - 0,871)} = 0,359$. Dengan demikian gambar diagram jalur Model II sebagai berikut:

Gambar 4.5
Diagram Jalur Model II

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2025

- 1) Hasil diagram jalur diatas menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD (X_1) berpengaruh secara positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), dengan koefisien regresi sebesar 10,504, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui

Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-138,820) \times (-0,121) = 16,797$ dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $10,504 + 16,797 = 27,301$.

- 2) Hasil diagram jalur diatas menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), dengan koefisien regresi sebesar $-0,058$, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-6,186) \times (-0,121) = 0,749$ dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $-0,058 + 0,749 = 0,691$.

6. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur uji sobel (*sobel test*) sebagai berikut:

1) Jalur 1 (Mediasi Pertumbuhan UMKM Antara Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

Hasil analisis diketahui pengaruh langsung yang diberikan Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan UMKM sebesar $-138,820$ dengan standar error sebesar $206,895$, sedangkan pengaruh langsung yang diberikan Pertumbuhan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah $-0,121$ dengan standar error sebesar $0,021$. Besar pengaruh tidak langsung Rasio Efektivitas

PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertumbuhan UMKM yaitu $-138,820 \times (-0,121) = 16,797$. Perhitungan uji t pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertumbuhan UMKM diselesaikan dengan rumus uji sobel sebagai berikut:

$$a = -138,820$$

$$b = -0,121$$

$$ab = -138,820 \times (-0,121) = 16,797$$

$$Sa = 206,895$$

$$Sb = 0,021$$

Jawab:

$$Sab = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

$$= \sqrt{(-0,121)^2 (206,895)^2 + (-138,820)^2 (0,021)^2 + (206,895)^2 (0,021)^2}$$

$$= \sqrt{642,083 + 8,499 + 18,877}$$

$$= \sqrt{669,459}$$

$$Sab = 25,874$$

$$\text{Jadi, } t = \frac{ab}{Sab} = \frac{(-138,820)(-0,121)}{25,874} = \frac{16,797}{25,874} = 0,649$$

Berdasarkan hasil uji sobel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh mediasi untuk jalur 1 nilai t hitung sebesar $0,649 < t$ tabelnya sebesar 2,353 dengan koefisien mediasi 16,797. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), atau H_6 ditolak.

2) Jalur 2 (Mediasi Pertumbuhan UMKM Antara Rasio Efisiensi PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

Hasil analisis diketahui pengaruh langsung yang diberikan Rasio Efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan UMKM sebesar -6,186 dengan standar error sebesar 21,339, sedangkan pengaruh langsung yang diberikan Pertumbuhan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah -0,121 dengan standar error sebesar 0,021. Besar pengaruh tidak langsung Rasio Efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertumbuhan UMKM yaitu $-6,186 \times (-0,121) = 0,749$. Perhitungan uji t pengaruh Rasio Efisiensi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertumbuhan UMKM diselesaikan dengan rumus uji

sobel sebagai berikut:

$$a = -6,186$$

$$b = -0,121$$

$$ab = (-6,186) \times (-0,121) = 0,749$$

$$Sa = 21,339$$

$$Sb = 0,021$$

Jawab:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2} \\ &= \sqrt{(-0,121)^2(21,339)^2 + (-6,186)^2(0,021)^2 + (21,339)^2(0,021)^2} \\ &= \sqrt{6,830 + 0,017 + 0,201} \\ &= \sqrt{7,048} \end{aligned}$$

$$S_{ab} = 2,655$$

$$\text{Jadi, } t = \frac{ab}{s_{ab}} = \frac{(-6,186)(-0,121)}{2,655} = \frac{0,749}{2,655} = 0,282$$

Berdasarkan hasil uji sobel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh mediasi untuk jalur 2 nilai t hitung sebesar $0,282 < t$ tabelnya sebesar 2,353 dengan koefisien mediasi 0,749. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), atau H_7 ditolak.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan atas hasil analisis tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pengaruh yang terjadi antar variabel dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan UMKM sebagai variabel intervening yang dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Jember. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan UMKM Daerah

Berdasarkan *output Coefficients*, diperoleh t-hitung sebesar -0,671 < t-tabel 2,353 dan nilai signifikansi $0,539 > 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar -138,820 bernilai negatif. Artinya bahwa Rasio Efektivitas

PAD (X_1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM (Z), maka H_1 ditolak. Hal tersebut dapat dijelaskan dari beberapa alasan berikut.

Pertama, dalam Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda yang diharapkan wirausaha akan tumbuh, berkembangnya, dan wirausaha muda yang tangguh, unggul, dan berdaya saing bisa lebih cepat.¹³⁹ Namun demikian, belum terdapat data akurat terkait implementasi program tersebut terutama di Kabupaten Jember. Meskipun Kabupaten Jember memiliki nilai rasio efektivitas PAD yang cukup efektif dengan rata-rata 94%, tidak dapat dipastikan angka tersebut dialokasikan untuk akses permodalan UMKM seperti bantuan Kredit Usaha Rakyat yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)¹⁴⁰. Selain itu, banyak pelaku usaha yang masih belum memahami bantuan dana KUR, sehingga banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.¹⁴¹

Kedua, meskipun nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan rata-rata 94%, akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja keuangan

¹³⁹ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 268.

¹⁴⁰ TNP2K, 80.

¹⁴¹ Putri Catur Ayu Lestari, Ummi Sa'idah, and Ummah Habibah, "Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada BRI Unit Gending Dan BRI Unit Pasar Lumbang," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 2 (2024): 59, <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.227>.

daerah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan UMKM. Artinya seberapa baik pemerintah dalam mengatur penerimaan PAD, hal tersebut tidak akan menjadi faktor yang akan meningkatkan pertumbuhan UMKM. UMKM dapat tumbuh bisa saja bukan hanya dari seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, namun juga dapat disebabkan dari stakeholder lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Utami, dan Murniningsih yang menyatakan bahwa modal sosial dan karakteristik pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.¹⁴²

2. Rasio Efisiensi PAD Terhadap Pertumbuhan UMKM Daerah

Berdasarkan *output Coefficients*, diperoleh t-hitung sebesar -0,290 < t-tabel 2,353 dan nilai signifikansi $0,786 > 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar -6,186 bernilai negatif. Artinya bahwa Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM (Z), maka H_2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM oleh TNP2K yang menyatakan mayoritas program pemberdayaan UMKM yang efektif dilakukan saat ini lebih berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM.¹⁴³ Sebab, faktor-faktor seperti akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan memiliki peran yang lebih

¹⁴² Utami and Murniningsih, "Pengaruh Modal Sosial Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi Pada UMKM Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang)," 666–67.

¹⁴³ TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 8.

besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM dibandingkan dengan seberapa efisien pemerintah dalam mengelola pengeluarannya. Namun demikian, rasio efisiensi yang baik menjadi salah satu indikator pemerintah daerah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengalokasikan pendapatannya ke sektor-sektor lain seperti UMKM. Jika melihat rasio efisiensi PAD Kabupaten Jember yang nilainya melebihi 100%, yang berarti kinerja keuangan Kabupaten Jember dikatakan tidak efisien. Rasio efisiensi PAD ini dapat menjadi petunjuk apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah sepadan dengan pendapatan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan UMKM. Artinya seberapa baik kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memaksimalkan pendapatan dengan biaya yang minimal, hal tersebut tidak akan menjadi faktor yang akan meningkatkan pertumbuhan UMKM. Selain efisiensi PAD, hasil penelitian oleh Utomo, dkk menyatakan bahwa bahwa UMKM dapat tumbuh dengan kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan.¹⁴⁴ Penelitian oleh Sabilla, dan Wijayangka juga menunjukkan hasil bahwa faktor literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha UMKM.¹⁴⁵

2. Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

¹⁴⁴ Utomo, Pujowati, and Utami, "Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, Dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis Pada Komunitas UMKM Di Jawa Timur," 153.

¹⁴⁵ Sonya Oktara Sabilla and Candra Wijayangka, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Pada UMKM," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 151, <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/almana/article/view/457/395>.

Berdasarkan *output Coefficients*, diperoleh t-hitung sebesar 1,145 < t-tabel 2,353 dan nilai signifikansi $0,335 > 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar 10,504 bernilai positif. Artinya bahwa Rasio Efektivitas PAD (X_1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_3 diterima.

Nilai Efektivitas PAD Kabupaten Jember memiliki rasio yang cukup tinggi yaitu dengan rata-rata 94% dan termasuk dalam kategori cukup efektif. Adapun yang menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak signifikan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Jember masih relatif kecil. Pada tahun 2017 - 2023 realisasi PAD Kabupaten Jember hanya menyumbang dibawah 25% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Rasio efektivitas PAD tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu 101% dan termasuk kategori sangat efektif. Dimana pada tahun 2019 ini pertumbuhan terus meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,31%. Seperti yang dinyatakan oleh Rachman bahwa peningkatan PAD dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin efektif PAD dikumpulkan, maka semakin baik juga dana yang tersedia untuk dialokasikan kepada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penurunan rasio efektivitas PAD berada pada tahun 2020 - 2021 yang mungkin disebabkan pandemi covid-19, yang

berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi hingga mencapai -2,98% pada tahun 2020.

Meskipun rasio efektifitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tetap menunjukkan peran PAD sebagai salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman, yang menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.¹⁴⁶ Hasil penelitian oleh Wardhana juga menyebutkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Jember sudah baik namun kemampuan dalam meningkatkan PAD kurang digali secara penuh.¹⁴⁷

3. Rasio Efisiensi PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan *output Coefficients*, diperoleh t-hitung sebesar -0,064 < t-tabel 2,353 dan nilai signifikansi 0,953 > 0,05, dengan koefisien regresi sebesar -0,058 bernilai negatif. Artinya bahwa Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_4 ditolak.

Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain dikarenakan nilai Rasio Efisiensi Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu diatas 100%, yang membuat nilai tersebut tidak sesuai dengan kriteria pengukuran atau dikatakan tidak efisien. Postur anggaran

¹⁴⁶ Rachman, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018," 81.

¹⁴⁷ Wardhana, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011," 98.

APBD Kabupaten Jember juga sempat mengalami defisit selama empat tahun dalam rentang tahun 2017 – 2023, yang disebabkan adanya dana transfer atau bagi hasil ke desa.

Ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya keefisienan dalam pengelolaan PAD. Namun, dalam pandangan Teori Keynes yang dikembangkan oleh Harrod-Domar efektivitas pengeluaran pemerintah bergantung pada tingginya tabungan dan investasi. Jika pemerintah mengeluarkan dana secara efisien pada proyek yang menjadi daya tarik para investor seperti proyek pembangunan jalan tol, maka akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi PAD dapat diartikan seberapa hemat pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk memperoleh pendapatan. Pengeluaran dalam hasil penelitian ini merupakan sesuatu yang pemborosan walaupun hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keynes yang menyatakan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah yang artinya semakin tidak efisien, maka akan menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi.¹⁴⁸ Di Kabupaten Jember ketika semakin tinggi pengeluaran pemerintah, hal tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat pula. Walaupun, hal tersebut bertolak belakang dengan kriteria pengukuran Rasio Efisiensi yang menyatakan bahwa

¹⁴⁸ Chalid, "Teori Pertumbuhan," 1.21-1.22.

semakin kecil nilai rasio maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hasil penelitian oleh Rachman juga menyatakan bahwa rasio efisiensi PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁹

4. Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan *output Coefficients*, diperoleh t-hitung sebesar -5,774 < t-tabel 2,353 dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar -0,121 bernilai negatif. Artinya bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_5 ditolak.

Pertumbuhan UMKM dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan secara teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa dengan melakukan spesialisasi produksi barang maka akan meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan suatu negara.¹⁵⁰ Namun, hubungan peningkatan pertumbuhan UMKM justru memberikan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari periode tahun 2017 – 2019 dimana pertumbuhan UMKM mengalami penurunan dan bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan, hal tersebut menjelaskan pertumbuhan UMKM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut perbandingan besar Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pertumbuhan UMKM.

¹⁴⁹ Rachman, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018,” 82.

¹⁵⁰ Wahab, *Ekonomi Internasional*, 46.

Gambar 4.6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Pertumbuhan UMKM Periode 2017 – 2023

Sumber: BPS dan Diskopum Kabupaten Jember, 2025

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim yang menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun yang membedakan adalah hasil penelitiannya menjadi tidak signifikan dikarenakan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju dapat meningkat karena perkembangan UMKM yang sudah ada.¹⁵¹

Penelitian yang lain menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur listrik, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan.¹⁵²

¹⁵¹ Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," 169.

¹⁵² Abdul Maqin, "Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat," *Trikonomika* 10, no. 1 (2011): 10–18.

5. Mediasi Pertumbuhan UMKM Antara Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh koefisien regresi sebesar 10,504, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-138,820) \times (-0,121) = 16,797$ dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $10,504 + 16,797 = 27,301$. Untuk uji sobel diperoleh nilai t-hitung sebesar $0,649 < t$ tabelnya 2,353 dengan koefisien mediasi 16,797. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), atau H_6 ditolak.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari yang menyatakan bahwa penyaluran kredit UMKM memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM yang nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.¹⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak berperan dalam menguatkan hubungan antara rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan UMKM dapat menjadi faktor pendukung antara penyaluran kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

¹⁵³ Ersya Ratna Sari, "Pengaruh Penyaluran Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Periode 2008-2012)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2014): 11, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2068>.

Meskipun keefektifitasan PAD merupakan sumber yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah yang penting, namun tidak secara otomatis menjamin pertumbuhan ekonomi akan dapat berpengaruh melalui mekanisme mediasi. Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Puspitaningrum dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan UKM gagal menjadi variabel intervening hubungan antara pendapatan sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah.¹⁵⁴

Penyebab pertumbuhan UMKM tidak memediasi hubungan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dimungkinkan karena masih kurangnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan angka antara pertumbuhan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi yang naik turun, bahkan cenderung setiap ada penurunan angka UMKM maka akan terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.22
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Pertumbuhan UMKM Periode 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,23	5,31	-2,98	4,00	4,53	4,93
Pertumbuhan UMKM (per unit usaha)	868	778	219	6416	365	872	391

¹⁵⁴ Puspitaningrum, "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Diy Dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Variabel Intervening," 54.

Sumber: BPS dan Diskopum Kabupaten Jember, 2025

Meskipun pertumbuhan UMKM tidak memediasi hubungan rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, namun rasio efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana koefisien regresinya menunjukkan nilai sebesar 10,504. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang berperan sebagai sumber keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terlepas dari bagaimana UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian, meskipun UMKM tidak berperan sebagai mediasi dalam hubungan ini tetapi efektivitas PAD masih dapat menjadi salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Mediasi Pertumbuhan UMKM Antara Rasio Efisiensi PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh koefisien regresi sebesar -0,058, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-6,186) \times (-0,121) = 0,749$ dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $-0,058 + 0,749 = 0,691$. Untuk uji sobel diperoleh nilai t-hitung sebesar $0,282 < t$ tabelnya sebesar 2,353 dengan koefisien mediasi 0,749. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan

UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), atau H_7 ditolak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Sari yang menyatakan bahwa penyaluran kredit UMKM memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM yang nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.¹⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak berperan dalam menguatkan hubungan antara rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan UMKM dapat menjadi faktor pendukung antara penyaluran kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun efisiensi pengelolaan keuangan adalah hal yang penting bagi pemerintah daerah dalam mengetahui keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi pengeluarannya, namun pertumbuhan UMKM tidak akan menjamin menjadi kontribusi di dalamnya yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan UMKM lebih berperan sebagai mediasi dalam penyaluran kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, karena produktivitas UMKM mendapat dampaknya secara langsung dari penyaluran kredit dalam memberikan akses modal. Berbeda dengan rasio efisiensi PAD yang memiliki jalur yang mungkin lebih panjang dan tidak langsung, sesuai dengan pengalokasian yang tepat dari

¹⁵⁵ Sari, "Pengaruh Penyaluran Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Periode 2008-2012)," 11.

pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Bahasoan, dkk mengungkapkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan tumbuh jika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.¹⁵⁶

Hasil uji analisis jalur dari hubungan Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan menunjukkan hasil negatif dengan koefisien regresi sebesar -0,058. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan pembiayaan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran belum mampu untuk memberikan pengaruhnya melalui pertumbuhan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵⁶ Awal Nopriyanto Bahasoan et al., "Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Literature Review," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 45, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji t, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,539 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,671 < t$ tabel 2,353, dengan koefisien regresi sebesar -138,820 bernilai negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM (Z), maka H_1 ditolak.
2. Berdasarkan hasil dari uji t, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,786 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar $0,290 < t$ tabel 2,353, dengan koefisien regresi sebesar -6,186 bernilai negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM (Z), maka H_2 ditolak.
3. Berdasarkan hasil dari uji t, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,335 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar $1,145 < t$ tabel 2,353, dengan koefisien regresi sebesar 10,504 bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD (X_1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_3 diterima.

4. Berdasarkan hasil dari uji t, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,953 > 0,05 dan diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,064 < t \text{ tabel } 2,353$, dengan koefisien regresi sebesar -0,058 bernilai negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efisiensi PAD (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_4 ditolak.
5. Berdasarkan hasil dari uji t, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,010 < 0,05 dan diperoleh nilai t hitung sebesar $5,774 < t \text{ tabel } 2,353$, dengan koefisien regresi sebesar -0,121 bernilai negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_5 ditolak.
6. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh koefisien regresi sebesar 10,504, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-138,820) \times (-0,121) = 16,797$ dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $10,504 + 16,797 = 27,301$. Untuk uji sobel diperoleh nilai t hitung sebesar $0,649 < t \text{ tabelnya } 2,353$ dengan koefisien mediasi 16,797. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efektivitas PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_6 ditolak.
7. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh koefisien regresi sebesar -0,058, sedangkan pengaruh tidak langsung Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pertumbuhan UMKM (Z) dapat dihitung dengan koefisien tidak langsung yaitu: $(-6,186) \times (-0,121) =$

0,749 dan pengaruh total yang diperoleh yaitu: $-0,058 + 0,749 = 0,691$. Untuk uji sobel diperoleh nilai t hitung sebesar $0,282 < t$ tabelnya $2,353$ dengan koefisien mediasi $0,749$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan UMKM (Z) tidak memediasi Rasio Efisiensi PAD (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka H_7 ditolak.

B. Saran-Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, dan efisien sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih baik lagi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Jember diharapkan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian realisasi PAD nya untuk sejalan dengan anggarannya atau lebih baik lagi jika melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah Kabupaten Jember juga diharapkan untuk lebih mengalokasikan anggarannya pada faktor yang mendukung peningkatan UMKM, seperti bantuan modal usaha atau pengadaan pelatihan kewirausahaan.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengingat untuk masyarakat setempat mengenai seberapa pentingnya kewajiban membayar pajak yang akan berdampak pada keefisienan

pengelolaan keuangan daerah, karena hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk acuan penelitian selanjutnya dan diharapkan juga peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain, baik dalam pengukuran kinerja keuangan daerah maupun variabel yang lain yang dapat dijadikan variabel intervening misalnya variabel belanja modal, dan penyaluran kredit UMKM. Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan rentang tahun penelitian jika data tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Al Ghifari Pulungan, Inggrit Syahla Octalin, and Ratih Kusumastuti. "Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Pada Kinerja Keuangan PT.Telkon Indonesia Tbk (Periode 2020-2022)." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 247–61. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.984>.
- Ambya. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2023.
- Azhari, Muhammad, Andria Zulfa, and Murtala. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh" Vol 5, no. 1 (2020): 81–94.
- "Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Susunan Tata Kelola Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember)." Accessed February 21, 2025. <https://ppid.jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/bkpad>.
- Bahasoan, Awal Nopriyanto, Anas Iswanto Anwar, Meldilianus Nabas J Lekas, and Rahmat Asryad. "Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Literature Review." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 43–46. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>.
- BPK, Database Peraturan. "Perbup No 8 Th 2023 KSOTK BPKAD." Jember: Database Peraturan BPK, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287993/perbup-kab-jember-no-8-tahun-2023>.
- BPS. "Berita Resmi Statistik." *Bps.Go.Id* 19, no. 27 (2022): 1–9. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>.
- . *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019*. Edited by Endang Widyarti and Oanesa Timoralif Cahya. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2020. <https://jemberkab.bps.go.id/id>.
- . *PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha*. Edited by BPS Kab. Bondowoso. Volume 17. Bondowoso:

BPS Kab. Bondowoso, 2024.

———. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Menurut Lapangan Usaha*. Edited by BPS Kab. Lumajang. Vol. 9. Lumajang: BPS Kab. Lumajang, 2024.

———. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2017-2021*. Edited by Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo: PT. Sinar MMurni Indo Printing, 2022.

Chalid, Pheni. “Teori Pertumbuhan.” In *Teori Dan Isu Pembangunan*, Edisi kedua, 475. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.

David Harianto, Priyo Hari Adi. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum , Belanja Modal , Aspp-15.” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, no. August (2007): 1–27.

Fajri, Ahadi Akbar, and Ririt Iriani. “Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021.” *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2022): 53–66. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2555>.

Febry Rachman, Dedy, and Syaiful Amri. “Studi Literatur Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Pelaku Wirausaha Di Kabupaten Lombok Timur Sebelum Covid 19.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 2 (2023): 709–20. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i2.24165>.

Firmansyah, Aditia Iqbal. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung.” *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2023. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.604>.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

———. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

Halim, Abdul; Kusufi, Muhammad Syam. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba 4, 2014.

Halim, Abdul. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–72. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.

- Handini, Sri, Sukei, and Hartati Kanty. *Manajemen UMKM Dan Koperasi. Manajemen : UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. "Metode Penelitian." In *Metodologi Penelitian*, edited by Mahir Pradana, 468–508. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/382052369>.
- Indahsari, Vina Risky. "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Dalam Sektor Pertanian." Skripsi, Universitas Jember, 2015.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013.
- Istighfaris, Rezki. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangkaraya*. Edited by Aas Masruroh. *Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 1. Bandung, 2021.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- "Kabupaten Jember." Accessed February 21, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember.
- Kemenag, Qur'an. "Qur'an Kemenag." Accessed May 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.
- Kenton, Will. "Specialization." Investopedia, 2022. <https://www.investopedia.com/terms/s/specialization.asp>.
- Lamazi. "Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (2020): 103–8. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491>.
- Lestari, Putri Catur Ayu, Ummi Sa'idah, and Ummah Habibah. "Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada BRI Unit Gending Dan BRI Unit Pasar Lumbang." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 2 (2024): 58–63. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.227>.
- Lutfiyah. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* vol 4, no. no 2 (2016): 204–13.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keem. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Maqin, Abdul. "Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat." *Trikonomika* 10, no. 1 (2011): 10–18.

- Muhid, Abdul. *Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*. Edited by Dona Nur Hidayat. *Zifatama Jawara*. Edisi Kedu. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Mulyati, Sri Nur. *Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Kelas Xi. Modul Ekonomi Kelas XI KD 3.2 Dan 4.2*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Murniati, Monika Palupi, Vena Purnamasari, Stephana Dyah Ayu R, Agnes Advensia C, Ranto Sihombing, and Yusni Warastuti. *Alat-Alat Pengujian Hipotesis. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 15. Semarang: Unika Soegijapranata, 2013.
- Nizar Rangkuti, Ahmad. "Menentukan Jumlah Sampel Dalam Penelitian." *12 Februari*, Padang, 2019. <https://www.uinsyahada.ac.id/bagaimana-menentukan-jumlah-sampel-dalam-penelitian/4/>.
- Novitasari, Anindita Trinura. "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9, no. 2 (2022): 184–204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>.
- Parmono, Agung, and Aminatus Zahriyah. "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol 6, no. 2 (2021): 209–41.
- Patarai, Dr Muhammad Idris. *Kinerja Keuangan Daerah.Pdf*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Pratiwi, Ana, and Fitriatul Muqmiroh. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022): 114–25. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.
- Priyono dan Zainuddin Ismail. *Teori Ekonomi*. Edited by Teddy Chandra. Surabaya: Dharma Ilmu, 2012.
- Puspitaningrum, Merynda. "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Diy Dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Variabel Intervening." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2016): 45–56. <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7999>.
- Putri, Erina Setiana, and Nur Ika Mauliyah. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus

- Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 108–17. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>.
- Putri Pratama, Dhea, Ira Grania Mustika, and Angga Permadi Karpriana. “Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada.” *JISAMAR: Ournal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 18, no. 04 (2024): 720–32. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>.
- Putri, Salsabila Septiani, and Sungkono. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Economina* Vol 2, no. 7 (2023): 1557–63. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.627>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed March 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rachman, Ridho. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rahma, Filasti Yunarsi, Wilda Fatmala, and Dewi Yulianti. “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 55–61. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>.
- Rochdianingrum, Widhi Ariestianti, and Teguh Gunawan Setyabudi. “Keterkaitan Antara Jumlah Umkm Dan Tingkat Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* vol 3, no. 4 (2020): 543–62. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4136>.
- Sabilla, Sonya Oktara, and Candra Wijayangka. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Pada UMKM.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 145–52. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/almana/article/view/457/395>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sari, Ersya Ratna. “Pengaruh Penyaluran Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Periode 2008-2012).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2014). <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2068>.
- Sevigo, Agis Eles, and Nurul Lathifah. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 3 (2024): 715–24. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2013.
- Sularso, Havid, and Yanuar E. Restianto. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.” *Media Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 109–24.
- Sulastrri. “Peran Penting UMKM Dalam Ancaman Isu Resesi.” Kementerian Keuangan, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>.
- Suparmono. “Pengantar Ekonomi Makro,” 2018, 262.
- Supriatna, Dasep, Eki Candra, Iwan Adinugroho, Muhammad Amsal Nasution, and Novi Yanti. “Pengaruh Kinerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi.” *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 1, no. 02 (2023): 43–53. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i02.88>.
- Suwandi, Kurni Adi, Afrizal Tahar, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta).” *Jurnal InFestasi* 11, no. 2 (2015): 118–36.
- Tiara, ferani inggrid. “Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur.” *Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya*, 2016.
- TNP2K, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. *International Journal of Technology*. Edisi Pert. Jakarta: Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j>.
- Utami, Rizky, and Rochiyati Murniningsih. “Pengaruh Modal Sosial Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi Pada UMKM Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang).” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, no. 1 (2020): 664–69. <https://bit.ly/3OTb9zl>.
- Utomo, Sulistyو Budi, Yenik Pujowati, and Eva Yuniarti Utami. “Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, Dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis Pada Komunitas UMKM Di Jawa Timur.”

Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science 2, no. 02 (2024): 146–56.
<https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>.

Wadma, Samalua. “Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan.” *Jurnal Warta*, 2016.

Wahab, Abdul. *Ekonomi Internasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.

Wardhana, Handhofi Tisna. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2000-2011.” Skripsi, Universitas jember, 2013.

Zakaria, Junaidin. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: (GP Press) Gaung Persada, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 April 2025

Saya yang menyatakan

Nur Ismi Romadhoni

NIM. 212105030034

Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember? Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM daerah Kabupaten Jember? Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember? Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember? 	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan UMKM Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi PAD <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p> <p>Jumlah Pertumbuhan UMKM Daerah per Tahunnya</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023</p> <p>Data Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2017-2023</p> <p>Data Pertumbuhan UMKM Daerah Tahun 2017-2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif Populasi dan sampel menggunakan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), tingkat PDRB, dan jumlah UMKM pada tahun 2017-2023 Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
JEMBER

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
	<p>5. Apakah pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?</p> <p>6. Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?</p> <p>7. Apakah pertumbuhan UMKM memediasi pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jember?</p>				<p>4. Data sekunder diperoleh dari kantor BPKAD, dan Diskopum Kabupaten Jember. Serta dari website BPS Kabupaten Jember</p> <p>5. Analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 27, dengan melakukan Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>), dan Uji sobel (<i>Sobel Test</i>)</p>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1346/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Jl. Letjen S.Parman No. 89, Tegal Boto Kidul, Karangrejo, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan
UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus
Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 02-16 Desember
2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

1. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember
2. Diskopum (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Jember
3. BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nuruk Widyawati Islami Rahayu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B/348 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
Jl. Ahmad Yani No. 02, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan
UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus
Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 02-16 Desember 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2016 - 2022

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nur Widyawati Islami Rahayu

cf

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1348/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Jl. Karimata No. 115, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 02-16 Desember 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

Data UMKM berupa jumlah unit UMKM per tahunnya dari tahun 2016 – 2022

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Istami Bahayu

4

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1325/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 27 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan
UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus
Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 02-16 Desember 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

<https://jemberkab.bps.go.id/id>

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

f.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1.Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kab. Jember
2.Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kab. Jember

di -

Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3747/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 28 November 2024, Nomor: B-1348/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 3509276211020003 / 212105030034
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. Mataram No 1 Mangli Kaliwates Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)
Lokasi : 1.BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember
2. Diskopum (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 02 Desember 2024 s/d 16 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 29 November 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
2.Yang Bersangkutan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kab. Jember)
Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

No.	Hari, Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 2 Desember 2024	Menyerahkan Surat Izin Penelitian, dan Surat Rekomendasi dari Bankesbanpol kepada Diskopum Kabupaten Jember
2.	Jum'at, 6 Desember 2024	Menembusi surat izin penelitian (Surat Izin penelitian di ACC)
3.	Senin, 9 Desember 2024	Meminta data dan penjelasan terkait data Pertumbuhan UMKM Kabupaten Jember pada Bidang Produksi
4.	Senin, 14 April 2025	Menyerahkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Proposal Hasil Olah Data Penelitian Skripsi kepada Diskopum Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 April 2025

A.n Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jember
Sekretaris

NANIK INDAH RUPIANI, S.H., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680322 199403 2010

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kab. Jember)
Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

No.	Hari, Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 2 Desember 2024	Menyerahkan Surat Izin Penelitian, Proposal Penelitian, dan Surat Rekomendasi dari Bankesbanpol ke BPKAD Kabupaten Jember
2.	Jum'at, 6 Desember 2024	Menembusi Surat Izin Penelitian dan Proposal Penelitian (proposal di ACC)
4.	Selasa, 10 Desember 2024	Meminta data LRA Tahun 2017 – 2023
5.	Senin, 14 April 2025	Meminta TTD untuk Surat Keterangan Selesai Penelitian di BPKAD Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
J E M B E R

Jember, 14 April 2025

Pt. BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER

JUPRIONO, ST. M.Si
NIP. 19730302 199901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. A. Yani No.2 Telp. (0331) 487211 Kode Pos 68118 Jember

SURAT KETERANGAN

No. 907/892/2709/42/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUPRIONO, ST, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUR ISMI ROMADHONI

NIM : 212105030034

Alamat : Jln. Argopuro No. 38, Dusun Krajan RT 01/RW 06, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur, 68193

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama yang tertera diatas telah melaksanakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember pada tanggal 02-16 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025

Plt. BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER

JUPRIONO, ST, M.Si
NIP. 19730302 199901 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Karimata No.115 Telp. (0331) 487211 Kode Pos 68121 Jember

SURAT KETERANGAN

No. 500-3 / 239 / 31.09. 324 / 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANIK INDAH RUPIANI, S.H, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUR ISMI ROMADHONI

NIM : 212105030034

Alamat : Jln. Argopuro No. 38, Dusun Krajan RT 01/RW 06, Desa Kalisat, Kec. Kalisat,
Kab.Jember, Jawa Timur, 68193

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Pertumbuhan UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah
Daerah Kab. Jember)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama yang tertera diatas telah melaksanakan penelitian
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember pada tanggal 02-16 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025

A.n Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kabupaten Jember
Sekretaris

NANIK INDAH RUPIANI, S.H, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19680322 199403 2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan
UMKM Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus
Pada Pemerintah Daerah Kab. Jember)

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 2 – 16
Desember 2024 dengan mengambil data dari <https://jemberkab.bps.go.id/id>

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025

A.n. Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. M.F. Hidayatullah, SHI, MSI

LAMPIRAN DATA SEKUNDER

1. Data Laporan Realisasi Anggaran Periode 2017 – 2023 a. LRA 2017

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	4.1.a				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.a.1)				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.a.1).a)	160.839.061.620,00	160.400.490.400,30	99,73	136.545.418.829,29
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.a.1).b)	35.861.369.175,00	34.759.419.167,00	96,93	36.311.518.801,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.a.1).c)	5.481.870.425,00	5.481.870.425,00	100,00	5.410.275.625,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.a.1).d)	534.744.807.883,11	516.571.801.058,48	96,98	345.870.663.761,67
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		736.927.109.103,11	719.213.581.070,78	97,60	524.137.897.016,96
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.1.a.2)				
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	4.1.a.2).a)				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		122.728.880.000,00	102.889.960.600,00	83,84	119.467.082.146,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		28.351.557.000,00	20.699.904.694,00	73,72	19.498.006.009,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		1.709.892.845.000,00	1.688.226.251.000,00	98,73	1.709.892.845.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		547.283.203.000,00	497.213.637.256,00	90,85	430.502.552.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		2.408.256.485.000,00	2.309.229.753.650,00	95,89	2.279.360.485.155,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	4.1.a.2).b)				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		205.006.634.000,00	204.705.147.644,00	99,85	160.346.922.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	35.188.438.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya		212.506.634.000,00	212.205.147.644,00	99,86	195.535.358.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	4.1.a.2).c)				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		171.903.591.753,00	227.388.231.722,00	132,28	178.117.385.301,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		171.903.591.753,00	227.388.231.722,00	132,28	178.117.385.301,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		2.792.666.710.753,00	2.748.823.132.916,00	98,43	2.653.013.228.456,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.a.3)				
1.3.1	Pendapatan Hibah		1.398.885.000,00	2.389.386.868,00	171,05	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		9.416.286.500,00	9.660.088.500,00	102,59	14.849.748.500,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		10.815.171.500,00	12.049.475.368,00	111,43	14.849.748.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN		3.540.408.991.356,11	3.480.086.187.354,78	98,30	3.192.000.871.972,96
2	BELANJA	4.1.b				
2.1	BELANJA OPERASI	4.1.b.1)				
2.1.1	Belanja Pegawai	4.1.b.1).a)	1.619.640.241.036,77	1.469.407.631.844,83	90,73	1.551.146.463.350,05
2.1.2	Belanja Barang	4.1.b.1).b)	1.073.086.254.820,62	762.486.731.168,85	71,06	472.944.255.764,12
2.1.3	Bunga	4.1.b.1).c)	0,00	0,00	-	0,00
2.1.4	Subsidi		0,00	0,00	-	0,00
2.1.5	Hibah	4.1.b.1).d)	80.650.719.000,00	127.042.521.070,00	157,52	85.585.334.993,00
2.1.6	Bantuan Sosial	4.1.b.1).e)	81.134.887.460,00	70.976.005.250,00	87,48	52.317.524.000,00
2.1.7	Bantuan Keuangan Lainnya	4.1.b.1).f)	397.094.821.129,00	828.090.997,00	0,21	343.893.432.212,00
	Jumlah Belanja Operasi		3.251.506.923.645,39	2.430.751.180.330,78	74,76	2.505.857.010.319,17
2.2	BELANJA MODAL	4.1.b.2)				
2.2.1	Belanja Tanah	4.1.b.2).a)	16.480.680.000,00	2.164.725.363,00	13,13	124.846.500,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.b.2).b)	287.765.940.954,56	231.237.105.195,14	80,36	132.660.495.356,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.b.2).c)	116.986.557.705,00	82.198.744.489,14	70,28	97.205.077.812,00
2.2.4	Belanja Jatan, Irigasi, dan Jaringan	4.1.b.2).d)	412.447.697.658,37	331.333.323.402,37	80,33	216.054.272.650,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.b.2).e)	11.053.835.300,00	10.657.963.468,00	96,42	2.720.329.291,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.1.b.2).f)	61.479.925.977,27	51.279.083.266,36	83,41	11.686.279.238,00
	Jumlah Belanja Modal		906.104.637.595,20	708.870.975.184,01	78,23	460.451.300.947,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.1.b.3)				
	Belanja Tak Terduga		8.266.100.000,00	3.266.100.000,00	39,51	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		8.266.100.000,00	3.266.100.000,00	39,51	0,00
	JUMLAH BELANJA		4.165.967.661.140,59	3.142.888.255.514,79	85,32	2.966.308.311.166,17
3	TRANSFER					
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	4.1.b.4)				
3.1	Bagi Hasil Pajak		17.575.618.650,00	17.435.635.693,00	99,20	9.308.575.381,00
3.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kpd Pemerintahan Desa		4.419.234.602,00	4.288.621.678,00	97,04	4.324.041.617,00
3.3	Transfer Bantuan keuangan lainnya		0,00	393.762.543.259,00	-	0,00
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		21.994.853.252,00	415.488.800.630,00	1.889,02	13.832.616.998,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.187.962.514.392,59	3.558.375.056.144,79	84,97	2.979.940.928.164,17
4	SURPLUS/DEFISIT		(647.555.523.036,48)	(78.288.868.790,01)	12,09	212.059.943.808,79

b. LRA 2018

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2018 Audited	%	Realisasi 2017 Audited
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	4.1.a	3.601.294.429.685,50	3.588.873.174.515,37	99,66	3.480.086.187.354,78
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.a.1)	609.304.818.610,50	597.509.388.023,37	98,06	719.213.681.070,78
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.a.1)a)	185.222.247.938,00	182.662.475.898,17	98,63	160.400.490.400,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.a.1)b)	33.293.275.775,00	37.969.490.704,04	114,05	34.759.419.187,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.a.1)c)	5.593.329.187,50	5.533.329.187,50	98,93	5.481.870.425,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.a.1)d)	385.195.965.710,00	371.324.092.233,66	96,40	518.571.801.058,48
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.1.a.2)	2.811.648.326.385,00	2.813.783.402.499,00	100,08	2.758.483.219.416,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	4.1.a.2)a)	2.380.522.046.000,00	2.347.407.698.706,00	98,61	2.293.136.013.028,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		113.747.442.000,00	103.204.377.032,00	90,73	86.796.220.178,00
1.2.1.2	Dana Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		39.442.830.000,00	68.371.280.627,00	173,34	20.899.904.594,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		1.697.477.217.000,00	1.697.477.217.000,00	100,00	1.688.226.251.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		529.854.557.000,00	478.354.824.047,00	90,28	497.213.637.256,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	4.1.a.2)b)	236.182.333.000,00	235.267.846.549,00	99,61	212.205.147.544,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		236.182.333.000,00	235.267.846.549,00	99,61	204.705.147.544,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	4.1.a.2)c)	184.662.747.385,00	220.826.657.244,00	119,58	243.481.972.344,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		184.662.747.385,00	220.826.657.244,00	119,58	243.481.972.344,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LAINNYA	4.1.a.2)d)	10.281.200.000,00	10.281.200.000,00	100,00	9.660.086.500,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi		10.281.200.000,00	10.281.200.000,00	100,00	9.660.086.500,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.a.3)	180.341.284.690,00	177.580.383.993,00	98,47	2.389.386.868,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		180.341.284.690,00	177.580.383.993,00	98,47	2.389.386.868,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		3.601.294.429.685,50	3.588.873.174.515,37	99,66	3.480.086.187.354,78
2	BELANJA	4.1.b	3.717.874.336.944,97	3.005.346.851.544,72	80,84	3.558.375.056.144,79
2.1	BELANJA OPERASI	4.1.b.1)	2.930.365.284.848,40	2.469.099.279.895,48	84,26	2.429.923.089.333,78
2.1.1	Belanja Pegawai	4.1.b.1)a)	1.427.529.918.593,57	1.271.839.105.905,62	89,09	1.469.407.831.844,93
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.1.b.1)b)	1.226.195.249.189,33	1.005.953.024.707,88	82,04	762.496.731.168,85
2.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	4.1.b.1)d)	119.482.385.008,50	50.271.116.225,00	42,07	127.042.521.070,00
2.2	BELANJA MODAL	4.1.b.2)	783.609.052.096,57	532.247.671.649,24	67,93	708.870.975.184,01
2.2.1	Belanja Tanah	4.1.b.2)a)	15.000.000.000,00	2.253.418.622,00	15,02	2.164.725.363,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.b.2)b)	156.558.579.142,00	135.388.306.925,78	86,48	231.237.105.185,14
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.b.2)c)	324.959.892.301,00	182.810.418.564,03	56,26	82.198.744.489,14
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan	4.1.b.2)d)	221.490.813.200,61	194.077.953.104,98	87,62	331.333.323.402,37
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.b.2)e)	4.915.544.100,00	4.780.015.031,00	96,84	10.657.993.468,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.1.b.2)f)	60.594.223.352,96	12.957.459.401,45	21,39	51.279.083.266,36
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.1.b.3)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.266.100.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.266.100.000,00
3	TRANSFER		445.760.603.987,00	444.760.603.987,00	99,78	416.314.891.627,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.1.b.4)	20.672.475.433,00	20.672.475.433,00	100,00	21.724.257.371,00
3.1.1	Bagi Hasil Pajak	4.1.b.4)a)	16.122.627.907,00	16.122.627.907,00	100,00	17.435.635.693,00
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	4.1.b.4)b)	4.549.847.526,00	4.549.847.526,00	100,00	4.288.621.678,00
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.1.b.4)c)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.b.4)	425.078.128.554,00	424.078.128.554,00	99,76	394.590.634.256,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		422.402.326.316,00	422.402.326.316,00	100,00	393.782.543.259,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.675.802.238,00	1.675.802.238,00	62,63	828.090.997,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.163.624.940.931,97	3.450.097.455.531,72	82,86	3.558.375.056.144,79
4	SURPLUS/DEFISIT		(562.330.511.246,47)	138.775.718.983,65	(24,68)	(78.288.868.790,01)

c. LRA 2019

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019 Audited	%	Realisasi 2018 Audited
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1.	3.866.530.712.878,46	3.815.931.626.881,96	98,69	3.588.873.174.515,37
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a)	662.481.418.206,46	667.598.426.909,96	100,77	597.509.388.023,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a).1.	202.584.747.938,00	191.800.060.051,00	94,68	182.682.475.898,17
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a).2.	37.541.930.253,00	40.479.330.988,00	107,82	37.969.490.704,04
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a).3.	5.752.248.169,00	5.752.248.168,75	100,00	5.533.329.187,50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.a).4.	416.602.491.846,46	429.566.787.702,21	103,11	371.324.092.233,66
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b)	3.030.598.569.982,00	2.961.401.173.862,00	97,72	2.813.783.402.499,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b).1.	2.530.360.442.000,00	2.402.647.387.288,00	94,95	2.347.407.698.706,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		103.353.544.000,00	92.277.144.326,00	89,28	103.204.377.032,00
1.2.1.2	Dana Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		84.377.104.000,00	62.473.489.515,00	74,04	68.371.280.627,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		1.765.927.493.000,00	1.765.927.493.000,00	100,00	1.697.477.217.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		144.713.958.000,00	117.760.013.902,00	81,37	64.030.905.224,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		431.988.343.000,00	364.209.246.545,00	84,31	414.323.918.823,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	5.1.1.b).2.	285.367.067.000,00	285.367.067.000,00	100,00	235.267.846.549,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	235.267.846.549,00
1.2.2.2	Pendapatan Dana Desa APBN		285.367.067.000,00	285.367.067.000,00	100,00	0,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b).3.	203.510.251.982,00	262.073.910.574,00	128,78	220.826.657.244,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		203.510.251.982,00	262.073.910.574,00	128,78	220.826.657.244,00
1.2.4	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LAINNYA	5.1.1.b).4.	11.360.809.000,00	11.312.809.000,00	99,58	10.281.200.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		11.360.809.000,00	11.312.809.000,00	99,58	10.281.200.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c)	173.450.724.690,00	186.932.026.110,00	107,77	177.580.383.993,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		173.450.724.690,00	186.932.026.110,00	107,77	177.580.383.993,00
	JUMLAH PENDAPATAN		3.866.530.712.878,46	3.815.931.626.881,96	98,69	3.588.873.174.515,37
2	BELANJA DAN TRANSFER	5.1.2.	4.059.339.811.197,36	3.379.816.155.289,86	83,26	3.005.346.851.544,72
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	3.100.229.457.088,94	2.648.219.127.480,13	85,42	2.469.099.279.895,48
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	1.633.392.408.692,82	1.466.342.071.926,27	89,77	1.271.839.105.905,62
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1.156.649.251.994,12	917.442.405.644,86	79,37	1.005.953.024.707,86
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	63.561.284.200,00	62.004.451.200,00	97,55	50.271.116.225,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	247.426.512.200,00	202.430.198.489,00	81,81	141.036.033.057,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2.	954.110.354.110,42	731.597.027.829,73	76,68	532.247.571.649,24
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1)	6.460.000.000,00	1.575.537.819,00	24,39	2.253.418.622,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2)	126.467.002.128,21	105.059.521.349,28	83,07	135.388.306.925,78
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3)	507.476.262.853,04	373.795.973.942,75	73,66	182.810.418.564,03
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4)	272.070.183.705,59	206.386.278.280,70	75,86	194.077.953.104,98
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5)	1.502.096.200,00	1.464.844.200,00	97,52	4.760.015.031,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6)	40.134.809.223,58	43.314.872.238,00	107,92	12.957.459.401,45
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.	5.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		5.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
3	TRANSFER	5.1.3.	498.350.614.460,22	497.096.422.984,22	99,75	444.750.603.987,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1.	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22	100,00	20.672.475.433,00
3.1.1	Bagi Hasil Pajak		18.268.247.589,82	18.268.247.589,82	100,00	16.122.627.907,00
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi		3.796.949.070,40	3.796.949.070,40	100,00	4.549.847.526,00
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2.	476.285.417.800,00	475.031.226.324,00	99,74	424.078.128.554,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		474.595.778.300,00	473.400.555.824,00	99,75	422.402.326.316,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.689.639.500,00	1.630.670.500,00	96,51	1.675.802.238,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.557.690.425.657,58	3.876.912.578.274,08	85,06	3.450.097.455.531,72
4	SURPLUS/DEFISIT	5.1.4.	(691.159.712.779,12)	(60.980.951.392,12)	8,82	138.775.718.983,65

d. LRA 2020

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 Audited	%	Realisasi 2019 Audited
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1	3.665.003.964.118,68	3.531.439.425.487,65	96,36	3.815.931.626.881,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	660.367.999.055,62	593.175.154.485,65	89,82	667.598.426.909,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		213.458.018.646,00	183.641.795.462,00	86,03	191.800.060.051,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		27.514.827.730,00	32.377.780.518,00	117,67	40.479.330.988,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.702.248.169,00	5.391.983.375,00	94,56	5.752.248.168,75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		413.692.904.510,62	371.763.595.130,65	89,86	429.566.787.702,21
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.781.987.289.998,00	2.745.916.417.419,00	98,70	2.961.401.173.862,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN		2.240.229.530.000,00	2.208.327.873.867,00	98,58	2.402.647.387.288,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		97.015.441.000,00	92.399.907.792,00	95,24	92.277.144.326,00
1.2.1.2	Dana Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		21.188.439.000,00	45.778.954.904,00	216,06	62.473.489.515,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		1.644.233.797.000,00	1.611.693.896.000,00	98,02	1.765.927.493.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		477.791.853.000,00	458.455.115.171,00	95,95	481.969.260.447,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA		317.610.537.000,00	317.610.537.000,00	0,00	285.367.067.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa APBD		302.669.947.000,00	302.669.947.000,00	100	285.367.067.000,00
1.2.2.5	Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan		14.940.590.000,00	14.940.590.000,00	0,00	0,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		213.166.303.798,00	208.997.087.352,00	98,04	262.073.910.574,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		213.166.303.798,00	208.997.087.352,00	98,04	262.073.910.574,00
1.2.4	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LAINNYA		10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100	11.312.809.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		10.980.919.200,00	10.980.919.200,00	100	11.312.809.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	222.648.675.065,06	192.347.853.583,00	86,39	186.932.026.110,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		222.648.675.065,06	192.347.853.583,00	86,39	186.932.026.110,00
	JUMLAH PENDAPATAN		3.665.003.964.118,68	3.531.439.425.487,65	96,36	3.815.931.626.881,96
2	BELANJA	5.1.2	3.777.841.796.797,66	2.803.531.977.132,74	74,21	3.379.816.155.289,86
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3.058.608.579.647,11	2.537.125.944.923,41	82,95	2.648.219.127.460,13
2.1.1	Belanja Pegawai		1.478.119.838.992,14	1.302.444.954.864,63	88,11	1.466.342.071.926,27
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		1.229.488.460.654,97	937.975.689.059,78	76,29	917.442.405.644,86
2.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah		175.108.597.000,00	170.727.926.999,00	97,50	62.004.451.200,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		175.891.683.000,00	125.977.374.000,00	71,62	202.430.198.489,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	318.233.217.150,55	188.310.951.430,71	59,17	731.597.027.829,73
2.2.1	Belanja Tanah		1.358.000.000,00	0,00	0,00	1.575.537.819,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		60.439.876.880,00	45.176.273.061,00	74,75	105.059.521.349,28
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		104.456.380.006,73	62.936.606.680,95	60,25	373.795.973.942,75
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		77.302.387.955,00	17.154.097.754,76	22,19	206.386.278.280,70
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		878.009.450,00	878.009.450,00	100	1.464.844.200,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		73.798.562.758,82	62.165.964.484,00	84,24	43.314.872.238,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	401.000.000.000,00	78.095.080.778,62	19,48	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		401.000.000.000,00	78.095.080.778,62	19,48	0,00
3	TRANSFER	5.1.2.4	494.079.687.160,22	494.079.687.160,22	100	497.096.422.984,22
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.2.4.1	22.065.196.680,22	22.065.196.680,22	100	22.065.196.680,22
3.1.1	Bagi Hasil Pajak		18.268.247.589,82	18.268.247.589,82	100	18.268.247.589,82
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi		3.796.949.070,40	3.796.949.070,40	100	3.796.949.070,40
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2	472.014.490.500,00	472.014.490.500,00	100	475.031.228.324,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		470.177.055.000,00	470.177.055.000,00	100	473.400.555.824,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.837.435.500,00	1.837.435.500,00	100	1.630.670.500,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.271.921.483.957,88	3.297.611.664.292,96	77,19	3.876.912.578.274,08
4	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(606.917.519.839,20)	233.827.761.194,69	(38,53)	(60.980.951.392,12)

e. LRA 2021

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2021 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020 (Audited)
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	226.430.500.000,00	209.903.218.787,00	92,70	183.641.795.462,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	42.203.813.283,00	31.782.076.707,20	75,31	32.377.780.518,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.102.248.169,00	7.064.696.843,75	115,77	5.391.983.375,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	445.143.354.148,00	386.555.973.285,29	86,84	371.763.595.130,65
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		719.879.915.600,00	635.305.965.623,24	88,25	593.175.154.465,65
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	5.1.1.2.1.1	102.496.699.000,00	138.877.535.344,00	135,49	92.399.907.792,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	40.866.264.000,00	65.369.009.534,00	159,96	45.778.954.904,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	1.607.489.075.000,00	1.607.489.075.000,00	100,00	1.611.693.896.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.4	97.320.963.000,00	74.298.097.006,00	76,34	94.832.656.525,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.5	402.325.979.000,00	319.457.117.333,00	79,40	363.622.456.646,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)		2.250.498.980.000,00	2.205.490.834.217,00	98,00	2.208.327.673.967,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
17	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	14.940.590.000,00
18	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	312.422.908.000,00	238.094.384.200,00	76,21	302.669.947.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s/d 18)		312.422.908.000,00	238.094.384.200,00	76,21	317.610.537.000,00
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	168.917.893.072,00	277.603.727.254,00	164,34	208.997.087.352,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.3	11.476.538.357,00	11.301.538.357,14	98,48	10.980.919.200,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21 s/d 23)		180.394.431.429,00	288.905.265.611,14	160,15	219.978.006.552,00
25	Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 24)		2.743.316.319.429,00	2.732.490.484.028,14	99,61	2.745.916.417.419,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	21.520.681.000,00	3.230.475.179,00	15,01	192.347.853.583,00
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	196.715.659.531,00	194.299.192.000,00	98,77	0,00
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (27 s/d 28)		218.236.340.531,00	197.529.667.179,00	90,51	192.347.853.583,00
30	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 25 + 29)		3.681.432.575.560,00	3.565.326.116.830,38	96,65	3.331.439.425.467,65
31	BELANJA DAN TRANSFER	5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.577.664.970.315,00	1.432.378.400.974,85	90,79	1.302.444.954.864,63
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.372.321.083.324,00	1.130.710.076.918,70	82,39	937.975.689.059,78
35	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	122.337.394.003,00	108.436.785.475,00	88,64	170.727.926.999,00
38	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	49.539.294.000,00	47.176.593.200,00	95,23	125.977.374.000,00
39	Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 38)		3.121.862.751.642,00	2.718.701.856.568,55	87,09	2.537.125.944.923,41
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
41	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	3.148.581.317,00	1.188.883.260,00	37,76	0,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	208.761.624.080,00	139.204.965.237,00	66,68	45.176.273.061,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	52.031.978.434,00	41.602.904.348,00	79,96	62.938.606.680,95
44	Belanja Modal Jalan, Kigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	401.577.686.473,00	303.139.295.524,66	75,49	17.154.097.754,76
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	69.831.050.424,00	66.946.395.198,00	95,87	878.009.450,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	62.165.964.484,00
47	Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)		735.350.920.728,00	552.082.443.567,66	75,08	188.310.951.430,71

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2021 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020 (Audited)
48	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
49	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	40.357.565.574,00	15.409.769.557,00	38,18	76.095.080.778,62
50	Jumlah Belanja Tidak Terduga (50)		40.357.565.574,00	15.409.769.557,00	38,18	76.095.080.778,62
51	TRANSFER	5.1.2.4				
52	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.1	18.268.247.590,00	18.268.247.589,82	100,00	18.268.247.589,82
53	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.2.4.2	3.796.949.070,00	3.796.949.069,40	100,00	3.796.949.070,40
54	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.2.4.3	495.448.525.856,00	421.120.002.056,00	85,00	470.177.055.000,00
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.4	2.247.427.568,00	2.247.427.568,00	100,00	1.837.435.500,00
56	Jumlah Transfer (52 s/d 55)		519.761.150.084,00	445.432.626.283,22	85,70	494.079.687.160,22
57	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (39 + 47 + 50 + 56)		4.417.332.388.028,00	3.731.626.715.976,43	84,48	3.297.611.664.292,96
58	SURPLUS/DEFISIT (30 - 57)	5.1.3	(735.899.812.468,00)	(166.300.599.146,05)	22,60	233.827.761.194,69

f. LRA 2022

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022 (Audited)	%	Realisasi 2021 (Audited)
1	PENDAPATAN	4				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.01	294.321.940.000,00	293.578.032.475,00	99,75	209.903.218.787,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.02	48.249.287.793,00	38.871.533.956,00	80,56	31.782.076.707,20
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.03	6.102.248.169,00	6.829.382.856,25	111,92	7.064.696.843,75
6	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.04	346.176.406.000,00	300.964.881.074,07	86,94	386.555.973.285,29
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		694.849.881.962,00	640.243.830.361,32	92,14	635.305.965.623,24
8	PENDAPATAN TRANSFER	4.2				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	4.2.01.01				
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.01.01.01	192.013.108.612,00	217.436.809.930,00	113,24	204.246.544.878,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.01.02	1.607.489.075.000,00	1.597.514.133.650,00	99,38	1.607.489.075.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.01.01.03	77.903.630.000,00	60.010.011.721,00	77,03	74.298.097.006,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.01.01.04	627.375.205.000,00	560.612.553.129,00	89,36	319.457.117.333,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)		2.504.781.016.612,00	2.435.573.308.430,00	97,24	2.205.490.834.217,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA					
17	Dana Insentif Daerah (DID)	4.2.01.02	10.364.617.000,00	10.364.617.000,00	100,00	0,00
18	Dana Desa	4.2.01.05	315.343.690.000,00	315.343.690.000,00	100,00	238.094.384.200,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya (17 s/d 18)		325.708.307.000,00	325.708.307.000,00	100,00	238.094.384.200,00
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4.2.02				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.02.01	274.259.000.560,00	273.618.771.679,00	99,77	277.603.727.254,00
22	Bantuan Keuangan	4.2.02.02	10.861.877.000,00	11.381.077.000,00	104,78	11.301.538.357,14
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21 s/d 22)		285.120.877.560,00	284.999.848.679,00	99,96	288.905.265.611,14
24	Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23)		3.115.610.203.172,00	3.046.281.464.109,00	97,77	2.732.490.484.028,14
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.3				
26	Pendapatan Hibah	4.3.01	21.434.337.465,00	10.930.595.096,00	51,00	3.230.475.179,00
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.03	20.347.308.663,00	17.704.234.337,00	87,01	194.299.192.000,00
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (26 s/d 27)		41.781.646.128,00	28.634.829.433,00	68,53	197.529.667.179,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 28)		3.652.241.731.262,00	3.715.160.123.903,32	96,44	3.665.326.116.830,38
30	BELANJA DAN TRANSFER					
31	BELANJA OPERASI	5.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.01	1.466.744.121.208,00	1.384.497.512.083,00	94,39	1.432.378.400.974,85
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	1.438.380.097.591,00	1.297.772.326.967,46	90,22	1.130.710.076.918,70
34	Belanja Bunga	5.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Subsidi	5.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Hibah	5.1.05	94.693.757.760,00	93.923.338.592,00	99,19	106.436.785.475,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.06	48.321.471.000,00	44.178.244.900,00	91,43	47.176.593.200,00
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)		3.048.139.447.557,00	2.820.371.422.542,46	92,53	2.718.701.856.568,55
39	BELANJA MODAL	5.2				
40	Belanja Modal Tanah	5.2.01	0,00	0,00	0,00	1.188.883.260,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	117.899.926.570,00	110.179.303.905,66	93,45	139.204.965.237,00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03	125.374.831.437,00	116.408.013.296,63	92,85	41.602.904.348,00
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.04	577.881.101.224,00	571.284.002.627,99	98,85	303.139.295.524,66
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.05	34.586.131.838,00	31.458.154.766,61	90,96	66.948.395.198,00
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)		855.741.991.069,00	829.309.474.596,91	96,91	552.082.443.567,66
47	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3				
48	Belanja Tidak Terduga	5.3.01	4.906.113.987,00	1.483.241.150,00	30,23	15.409.789.557,00
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (48)		4.906.113.987,00	1.483.241.150,00	30,23	15.409.789.557,00
50	BELANJA TRANSFER	5.4				

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022 (Audited)	%	Realisasi 2021 (Audited)
51	Belanja Bagi Hasil	5.4.01	22.065.196.660,00	22.065.196.658,00	100,00	22.065.196.659,22
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.4.02	490.908.807.809,00	490.132.267.069,00	99,84	423.367.429.624,00
53	Jumlah Transfer (51 s/d 52)		512.974.004.469,00	512.197.463.727,00	99,85	445.432.626.283,22
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 46 + 49 + 53)		4.421.761.557.082,00	4.163.361.602.016,37	94,16	3.731.626.715.976,43
55	SURPLUS/DEFISIT (29 - 54)		(569.519.825.820,00)	(448.201.478.113,05)	78,70	(166.300.599.146,05)

g. LRA 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4		6	7
1	PENDAPATAN	4				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.01	322.450.000.000,00	288.151.785.388,00	89,36	293.578.032.475,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.02	30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40	38.871.533.956,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.03	7.189.012.400,00	7.189.012.393,75	100,00	6.829.382.856,25
6	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.04	486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89	300.964.881.074,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		845.987.143.485,00	764.496.302.893,85	90,37	640.243.830.361,32
8	PENDAPATAN TRANSFER	4.2				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	4.2.01.01				
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.01.01.01	198.680.665.988,00	210.923.988.652,00	106,16	217.436.609.930,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.01.02	1.687.191.605.000,00	1.704.938.164.985,00	101,05	1.597.514.133.650,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.01.01.03	49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36	60.010.011.721,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.01.01.04	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	560.612.553.129,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)		2.504.510.973.348,00	2.522.861.210.219,00	100,73	2.435.573.308.430,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
17	Dana Insentif Daerah (DID)	4.2.01.02	0,00	0,00	0,00	10.364.617.000,00
18	Dana Desa	4.2.01.05	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	315.343.690.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s/d 18)		324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	325.708.307.000,00
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4.2.02				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.02.01	310.178.333.400,00	334.510.008.600,00	107,84	273.618.771.679,00
22	Bantuan Keuangan	4.2.02.02	11.081.542.821,00	11.626.442.821,00	104,92	11.381.077.000,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21 s/d 22)		321.259.876.221,00	346.136.451.421,00	107,74	284.999.848.679,00
24	Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23)		3.149.862.264.569,00	3.191.994.244.040,00	101,34	3.046.281.464.109,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.3				
26	Pendapatan Hibah	4.3.01	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	10.930.595.096,00
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.03	0,00	0,00	0,00	17.704.234.337,00
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (26 s/d 27)		1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	28.634.829.433,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 28)		3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	99,01	3.715.160.123.903,32
30	BELANJA DAN TRANSFER					
31	BELANJA OPERASI	5.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.01	1.506.793.438.014,00	1.361.120.333.591,47	90,33	1.384.497.512.083,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	92,00	1.297.772.326.967,46
34	Belanja Bunga	5.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Subsidi	5.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Hibah	5.1.05	277.187.318.968,00	270.995.238.880,00	97,77	93.923.338.592,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.06	32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	89,14	44.178.244.900,00
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)		3.288.813.950.585,00	3.015.559.884.677,66	91,69	2.820.371.422.542,46
39	BELANJA MODAL	5.2				
40	Belanja Modal Tanah	5.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	99.421.865.814,00	79.716.522.691,50	80,18	110.179.303.905,68
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03	60.165.714.406,00	54.635.641.878,00	90,81	116.408.013.296,63
43	Belanja Modal Jalan, Ingsi dan Jaringan	5.2.04	45.736.033.942,00	43.233.220.730,76	94,53	571.264.002.627,99
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.05	54.734.987.026,00	54.351.340.328,00	99,30	31.458.154.766,61
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.05	505.864.732,00	227.022.748,00	44,88	0,00
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)		260.564.465.920,00	232.163.748.376,26	89,10	829.309.474.596,91

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4		6	7
47	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3				
48	Belanja Tidak Terduga	5.3.01	45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	70,53	1.483.241.150,00
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (48)		45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	70,53	1.483.241.150,00
50	BELANJA TRANSFER	5.4				
51	Belanja Bagi Hasil	5.4.01	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	22.065.196.658,00
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.4.02	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00
53	Jumlah Transfer (51 s/d 52)		523.738.946.077,00	522.644.113.477,00	99,79	512.197.463.727,00
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 46 + 49 + 53)		4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33	4.163.361.602.016,37
55	SURPLUS/DEFISIT (29 - 54)		(121.337.947.708,00)	155.204.589.589,93	227,91	(448.201.478.113,05)

2. Data Pertumbuhan Ekonomi Periode 2017 – 2023
a. Pertumbuhan Ekonomi Periode 2015 – 2019

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	3,99	3,29	2,15	0,08	1,46
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,97	4,99	5,69	5,67	0,92
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6,51	4,25	5,61	6,94	6,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,62	6,74	4,76	4,90	5,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,11	5,23	6,49	6,32	6,40
F	Konstruksi/Construction	5,24	6,92	7,59	7,72	8,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,39	7,14	7,75	8,42	7,80
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	7,37	7,42	7,41	7,52	8,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	6,61	9,35	9,02	9,03	9,89
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,58	8,45	7,72	8,13	9,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	5,12	7,15	4,23	5,51	4,53
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,75	6,19	5,39	6,48	6,66
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6,09	6,16	6,59	7,23	7,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,55	5,24	2,70	6,88	3,08
P	Jasa Pendidikan/Education	5,29	5,78	5,46	6,23	6,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	6,54	7,25	6,81	7,13	7,67
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	4,67	4,84	4,17	5,75	5,88
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,36	5,23	5,11	5,23	5,31

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

b. Pertumbuhan Ekonomi Periode 2019 – 2023

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Jember Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Persen), 2019–2023
Appendix
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product of Jember Regency at
2010 Constant Market Prices by Industry (Percent), 2019–2023

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishery	1,46	-1,07	-0,11	3,15	2,47
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	0,92	-6,61	1,15	4,34	3,72
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7,06	-6,77	8,08	3,19	5,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	5,18	0,53	2,30	6,59	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	4,07	7,28	0,20	3,75	4,07
F	Konstruksi/Construction	-6,74	2,11	6,33	6,12	-6,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	-5,67	8,28	6,85	5,63	-5,67
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	8,58	-6,05	7,60	16,07	12,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	9,89	-13,26	3,04	11,81	9,68
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	9,33	10,02	7,72	5,87	6,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	4,53	-0,12	1,39	2,66	4,47
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,66	2,53	1,94	5,07	2,94
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,41	-4,78	2,15	5,51	10,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	3,08	-2,22	-0,06	0,92	1,62
P	Jasa Pendidikan/Education	6,83	2,50	1,49	1,12	5,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	7,67	9,29	-1,83	3,96	7,29
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	5,88	-14,15	4,14	12,02	6,25
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,51	-2,98	4,00	4,53	4,93

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

3. Data Pertumbuhan UMKM Periode 2017 – 2023

**REKAPITULASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN USAHA (SKU)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tahun 2011 S/d 2016	4.217	
2	Tahun 2017	868	
3	Tahun 2018	778	
4	Tahun 2019	219	
5	Tahun 2020	6.416	
6	Tahun 2020	201.527	SKU yang belum dicetak/Print
7	Tahun 2021	365	
8	Tahun 2021	56.644	SKU yang belum dicetak/Print
9	Tahun 2022	872	
10	Tahun 2023 (Per Tgl, 29 Des 2023)	391	
	JUMLAH	272.297	

Keterangan:

Data ODS (Online Data System)	=	427.095
Pengajuan SKU dan BPUM	=	272.297
Tidak tercatat	=	154.798

Demikian Laporan Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HASIL OLAH DATA SPSS

1. Hasil Uji Normalitas Model I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		7	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	20,87005515	
Most Extreme Differences	Absolute	,302	
	Positive	,302	
	Negative	-,158	
Test Statistic		,302	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,052	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,050	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,044
		Upper Bound	,056

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1502173562.

2. Hasil Uji Normalitas Model II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		7	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,75948984	
Most Extreme Differences	Absolute	,225	
	Positive	,147	
	Negative	-,225	
Test Statistic		,225	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,359	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,347
		Upper Bound	,371

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 743671174.

3. Hasil Uji Multikolinieritas Model I

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	RASIO EFEKTIVITAS PAD	,999	1,001
	RASIO EFISIENSI PAD	,999	1,001

a. Dependent Variable: transform_z_SQRT

4. Hasil Uji Multikolinieritas Model II

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	RASIO EFEKTIVITAS PAD	,897	1,114
	RASIO EFISIENSI PAD	,978	1,023
	transform_z_SQRT	,885	1,130

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	252,566	113,802		2,219	,091
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	-199,778	104,943	-,656	-1,904	,130
	RASIO EFISIENSI PAD	-10,597	10,824	-,337	-,979	,383

a. Dependent Variable: ABS_RES

6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,397	1,916		-2,817	,067
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	4,422	1,713	,690	2,581	,082
	RASIO EFISIENSI PAD	,387	,169	,585	2,286	,106
	transform_z_SQRT	,000	,004	-,033	-,122	,910

a. Dependent Variable: ABS_RES

7. Hasil Uji Autokorelasi Model I

Runs Test

Unstandardized Residual

Test Value ^a	,33329
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	6
Z	,910
Asymp. Sig. (2-tailed)	,363

a. Median

8. Hasil Uji Autokorelasi Model II

Runs Test

Unstandardized Residual

Test Value ^a	,14080
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	3
Z	-,788
Asymp. Sig. (2-tailed)	,431

a. Median

9. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	192,172	224,362		,857	,440
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	-138,820	206,895	-,316	-,671	,539
	RASIO EFISIENSI PAD	-6,186	21,339	-,136	-,290	,786

a. Dependent Variable: transform_z_SQRT

10. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2,015	10,256		-,196	,857
	RASIO EFEKTIVITAS PAD	10,504	9,170	,177	1,145	,335
	RASIO EFISIENSI PAD	-,058	,906	-,010	-,064	,953
	transform_z_SQRT	-,121	,021	-,899	-5,774	,010

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,221	-,168	3,23752

a. Predictors: (Constant), RASIO EFISIENSI PAD, RASIO EFEKTIVITAS PAD

12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model II

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,967 ^a	,936	,871	1,07408

a. Predictors: (Constant), transform_z_sqrt, RASIO EFISIENSI PAD, RASIO EFEKTIVITAS PAD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kallwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan UMKM sebagai variable intervening (Studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten Jember)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 29 April 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El.)
NIP. 197709142005012004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 April 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian		
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 April 2025
Pembimbing

Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A
NIP. 199206062020122010

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nur Ismi Romadhoni
NIM : 212105030034
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 November 2002
Alamat : Jl. Argopuro No. 38, Dusun Krajan, RT
001/RW 006, Desa Kalisat, Kec. Kalisat,
Kab. Jember, Jawa Timur
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : nurismiromadhoni@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Pertiwi : 2008 – 2009
SDN Ajung 02 : 2009 – 2015
SMP Negeri 1 Kalisat : 2015 – 2018
SMA Negeri Kalisat : 2018 – 2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021 – 2025